

PROFILE



DEKOPIN

DEWAN KOPERASI INDONESIA

The Indonesian Co-operative Council



ICA Library
334(950)
ICA-I
ICA 02108



SAMBUTAN KETUA UMUM DEKOPIN



DEKOPIN

Sambutan KETUA UMUM DEKOPIN



Gerakan koperasi Indonesia telah mengalami sejarah panjang, bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka. Setelah Indonesia merdeka, para tokoh gerakan koperasi mempunyai keinginan kuat untuk menghimpun kekuatan gerakan koperasi dalam satu wadah organisasi. Keinginan ini, kemudian melahirkan Sentra Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia (SOKRI) sebagai salah satu keputusan penting Kongres Koperasi I, bulan Juli 1947, yang sekarang dikenal dengan nama Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin).

Dekopin konsisten memperjuangkan aspirasi gerakan koperasi, melalui tiga kegiatan utama, yaitu advokasi, fasilitasi, dan edukasi. Untuk pengembangan koperasi dan ekonomi nasional Indonesia ke depan, Dekopin telah melansir Visi Koperasi 2045: Koperasi Pilar Negara.

Pada 2045 kelak, tepat 100 tahun Indonesia merdeka, koperasi ditargetkan memainkan peran penting dalam berbagai sektor kehidupan, yang saling terkait dengan ekonomi.

Dalam Visi Koperasi 2045, koperasi diarahkan untuk mampu berperan aktif dalam merawat bumi dan menghemat sumber daya alam, menjamin kedaulatan/ketahanan pangan dan energi, melestarikan budaya dan kearifan lokal, menjaga kedaulatan NKRI di wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar. Untuk mewujudkan visi dengan rentang jauh ke depan itu, Dekopin menyusun cetak biru, yang menguraikan secara detail program dan tahapan pencapaiannya.

Semoga, profil organisasi ini, bisa memberikan gambaran tentang Dekopin, sekilas sejarahnya dan visi ke depan.

DEWAN KOPERASI INDONESIA
Ketua Umum,

H.A.M. Nurdin Halid

ICA 02108



Message FROM THE PRESIDENT

334(910)

The cooperative movement in Indonesia has experienced a long history, even before Indonesia's independence. After the independence of Indonesia, the leaders of cooperative movement had a strong desire to gather the strength of the cooperative movement in one organization. This desire was the one that formed the Central Organization of Indonesian Cooperative (SOKRI) as one of the most important decisions from the 1st Cooperative Congress which held in July 1947. Now it is known as The Indonesia Cooperative Council (DEKOPIN).

DEKOPIN consistently fights for the aspirations of the cooperative movement, through three main activities, which are advocacy, facilitation, and education. For the development of Indonesian cooperatives and national economy in the future, DEKOPIN has launched 'Cooperative Vision in 2045', that is Cooperative as Pillar of the State. In 2045, coincided with 100 years of Indonesian independence, cooperatives are targeted to play an important role in various sectors of life, which correlated with the economy.

In this vision, cooperatives are going to be directed to be able to take part actively in conserving the earth and its resources, ensuring food and energy security/sovereignty, preserving local wisdom and the culture, as well as keeping nation sovereignty in border areas and outermost islands. In order to realize this long-term vision, DEKOPIN has draw up the blue print which outlines in details both programs and it's achievement stages.

I hope, this organization profile could gives you a picture about DEKOPIN, whether the history or the vision.




334(910)

PENCERAHAN DARI BUNG HATTA

Apabila kita membuka UUD 1945 dan membaca serta menghayati Pasal 33, maka nampaklah di sana akan tercantum dua macam kewajiban atas tujuan yang satu. Tujuannya ialah menyelenggarakan kemakmuran rakyat dengan jalan menyusun perekonomian sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

Perekonomian sebagai usaha bersama berdasarkan kekeluargaan adalah koperasi, karena koperasilah yang menyatakan kerjasama antara mereka yang berusaha sebagai suatu keluarga. Disini tak ada pertentangan antara majikan dan buruh, antara pemimpin dan pekerja. Segala yang berkerja adalah anggota dari koperasinya,

sama-sama bertanggungjawab atas keselamatan koperasinya itu. Sebagaimana orang sekeluarga bertanggungjawab atas keselamatan rumah tangganya, demikian pula para anggota koperasi harus sama-sama bertanggungjawab atas koperasi mereka."



"Makmur koperasinya, makmurlah hidup mereka bersama. Rusak koperasinya, rusaklah hidup mereka bersama."

"If their cooperative is prosperous, their lives will all be prosperous. If their cooperative is shattered, their lives will all be shattered."

Dr. Mohammad Hatta
12 Agustus 1902 - 14 Maret 1980

Enlightenment from Bung Hatta

If we look at the Indonesian Constitution of 1945, read and comprehend the content of Article 33, it is foreseen that there are to obligations for one purpose. The purpose is to create people's prosperity by organizing economy as a mutual endeavor based on the principle of family system. Economy as mutual endeavor based

on the principle of family system means cooperatives because it is the cooperatives that states cooperation among those who work as a family. There are no conflict between employer and employees, between leader and worker. Those who work are members of the cooperative who are responsible for the security of the cooperative.

As a member of the family who is responsible for the safety of the household so will the members of the cooperatives. They are responsible for their cooperative."



AWAL KEBERADAAN DAN STATUS POSISI

Kebudayaan koperasi di Indonesia diawali tahun 1886. Tepatnya 16 Desember 1886, ketika R. Aria Wiraatmadja, Patih Purwokerto, mendirikan Hulp en Spaarbank. Lembaga dengan model koperasi kredit Raiffeisen itu dimaksudkan untuk menolong kaum priyayi dari cengkeraman lintah darat.

Upaya Aria Wiraatmadja mendapat dukungan yang luas dari kalangan pejabat pemerintahan kolonial. Sejak itu, koperasi mulai digiatkan dan ditempatkan sebagai bagian dari pelaksanaan politik etis.

Perkembangan koperasi sebagai gerakan rakyat mulai muncul tahun 1908. Gerakan yang dimotori oleh Boedi Oetomo itu ditandai dengan pendirian koperasi rumah tangga. Pada tahun 1913, Syarikat Dagang Islam membangkitkan kehidupan berkoperasi di kalangan pedagang dan pengusaha tekstil bumiputera. Dan, pada tahun 1927, kelompok Studie Club (Persatuan Bangsa Indonesia) membangkitkan gerakan koperasi sebagai wahana pendidikan ekonomi rakyat dan nasionalisme kebangsaan. Setelah Indonesia Merdeka, gerakan koperasi yang terpencar-pencar itu akhirnya berhasil dipersatukan. Meskipun dalam situasi genting, masyarakat gerakan koperasi tetap menggelar Kongres Gerakan Koperasi Pertama di Tasikmalaya, yang dihadiri oleh 500 utusan dari Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi. Kongres yang bersejarah itu telah menetapkan 10 keputusan, yaitu:

- **Pertama; dibentuk Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia atau disingkat SOKRI yang berkedudukan di Tasikmalaya.**
- **Kedua; Koperasi Indonesia berasaskan gotong-royong.**
- **Ketiga; menetapkan Peraturan Dasar SOKRI.**
- **Keempat; Pengurus SOKRI disusun secara Presidium dengan menetapkan Niti Sumantri sebagai Ketua yang disertai kewajiban untuk menyusun Badan Pekerja dan segala sesuatu yang berhubungan dengan keputusan Kongres.**
- **Kelima; kemakmuran rakyat harus dilaksanakan berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 dengan koperasi rakyat dan koperasi ekonomi sebagai pelaksana.**
- **Keenam; mendirikan Bank Koperasi Sentral.**
- **Ketujuh; ditetapkan pembentukan Koperasi Rakyat Desa yang menangani usaha kredit, konsumsi dan produksi dengan pernyataan bahwa Koperasi Rakyat Desa harus dijadikan dasar susunan SOKRI.**
- **Kedelapan; memperhebat dan memperluas pendidikan koperasi rakyat di kalangan masyarakat.**
- **Kesembilan; distribusi barang-barang penting harus diselenggarakan oleh koperasi.**
- **Kesepuluh; memutuskan tanggal 12 Juli sebagai Hari Koperasi yang setiap tahun harus diperingati.**

Dalam perjalanan kemudian, setelah mengalami pergantian nama beberapa kali, pada tahun 1968 nama SOKRI diubah menjadi Dewan Koperasi Indonesia atau disingkat DEKOPIN hingga sekarang.

DEKOPIN merupakan lembaga tunggal gerakan koperasi Indonesia sebagaimana digariskan dalam Penjelasan Pasal 57 UU Perkoperasian Nomor 25 Tahun 1992.



THE EARLY EXISTENCE AND POSITION



The existence of cooperative in Indonesia started on 16th December 1886, when R. Aria Wiraatmadja, the Governor of Purwekerto, established the HulpenSpaar bank. The institution with the Raiffeisen cooperatives credit model was meant to help the local noblemen from moneylenders clutch.

Aria Wiraatmadja efforts received broad support from the colonial government officials. Since then, cooperatives began to be intensified and placed as part of the implementation ethical politics.

The development of cooperatives as a people movement began to emerge in 1908. It was led by Boedi Oetomo and marked by the establishment of cooperative household. In 1913, Syarikat Dagang Islam evoked the life of cooperatives among traders and Bumiputera's textile entrepreneurs. Furthermore, in 1927, the Studieclub Group (Indonesian Union) generated the cooperative movement as a vehicle for populist economic education and nationalism.

After the independence of Indonesia, the cooperative movement which had been scattered finally could be united. Even in a precarious situation, the people of cooperative movement still held The First Congress of Cooperative movement in Tasikmalaya. There were 500 delegates from Java, Sumatera, Kalimantan and Sulawesi. This historical congress had set 10 decisions, namely:

- **First; Formed the Central Organization of Indonesian People Cooperative or abbreviated into SOKRI based in Tasikmalaya.**
- **Second; The principle of Indonesian Cooperatives is mutual assistance.**
- **Third; Set the basic rules of SOKRI.**
- **Fourth; Board of SOKRI is arranged with Presidium and assigning Niti Sumantri as a Chairman who entrusted with the obligation to draw up the Working Committee and all the things related to Congress decisions.**
- **Fifth; People welfare should be carried out under the Constitution 1945 article 33 with populist cooperative and cooperative economy as the implementer.**
- **Sixth; Establishing the Central Cooperative Bank.**
- **Seventh; Defining the establishment of Rural Cooperative that handles credit business, consumption and production with a statement that Rural Cooperative should be the basis of SOKRI's composition.**
- **Eighth; Intensifying and expanding the education of cooperative to the community.**
- **Ninth; The distribution of essential goods must be organized by cooperatives.**
- **Tenth; Deciding July 12th as the Day of Cooperatives and must be celebrated annually.**

In 1968, after changing names several times, the name of SOKRI was changed into Dewan Koperasi Indonesia (The Indonesian Cooperative Council) or abbreviated into DEKOPIN. The name is remained until now.

DEKOPIN is a single institution of Indonesian Cooperative Movement as outlined in the Explanation of Article 57 of Cooperatives Law No. 25 in 1992.

AWAL KEBERADAAN DAN STATUS POSISI

Sebagai lembaga gerakan koperasi yang otonom, DEKOPIN bertugas memperjuangkan cita-cita gerakan koperasi Indonesia, menyalurkan aspirasi anggota, menjadi wakil gerakan koperasi di dalam dan di luar negeri, serta berperan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan koperasi.

Untuk menjalankan peran dan fungsinya di seluruh wilayah Indonesia, gerakan koperasi di wilayah provinsi membentuk Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (DEKOPINWIL), dan di wilayah kabupaten/kota membentuk Dewan Koperasi Indonesia Daerah (DEKOPINDA). DEKOPINWIL dan DEKOPINDA merupakan bagian integral dari DEKOPIN.

DEKOPIN berkedudukan di Ibukota Negara RI, Jakarta; 33 DEKOPINWIL berkedudukan di tingkat provinsi; dan 385 DEKOPINDA berkedudukan di tingkat kabupaten/kota. Keanggotaan DEKOPIN terdiri dari koperasi yang berbadan hukum dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Koperasi sekunder yang keanggotaannya meliputi seluruh wilayah Indonesia atau lebih dari satu wilayah provinsi mendaftar ke DEKOPIN.**
- (2) Koperasi primer dan/atau koperasi sekunder yang keanggotaannya meliputi wilayah provinsi atau lebih dari satu wilayah kabupaten/kota mendaftar ke DEKOPINWIL.**
- (3) Koperasi primer yang keanggotaannya meliputi satu wilayah kabupaten/kota atau kurang mendaftar ke DEKOPINDA.**

DEKOPIN dipimpin oleh Ketua Umum yang dipilih dari dan oleh anggota dalam Musyawarah Nasional (MUNAS). DEKOPIN menganut sistem kepemimpinan secara kolektif dalam bentuk Pimpinan Paripurna dan Pimpinan Harian yang terdiri dari Wakil Ketua Umum dan Ketua Komite. MUNAS juga mengangkat Pengawas DEKOPIN untuk menjalankan tugas pengawasan



terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan DEKOPIN.

Untuk memberikan masukan, saran dan pertimbangan yang berkaitan dengan kebijakan perkoperasian dan pembangunan nasional, Pimpinan Paripurna mengangkat dengan Penasehat dan Majelis Pakar. Sedangkan untuk membantu pelaksanaan tugas operasional Pimpinan Paripurna dan Pimpinan Harian, DEKOPIN membentuk Sekretariat Jenderal yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.

DEKOPIN berpartisipasi aktif dalam organisasi koperasi internasional (International Cooperative Alliance - ICA) dan organisasi koperasi regional (Asian Cooperative Alliance - ACO). Saat ini, Ketua Umum DEKOPIN duduk Wakil Presiden ICA untuk wilayah Asia dan Pasifik.

THE EARLY EXISTENCE AND POSITION

As an autonomous institution of cooperative movement, DEKOPIN duties are to plead the ideals of Indonesian cooperative movement, to channel aspirations members, to act as a representative of cooperative movement both domestically and internationally, and as a government partner in cooperative development.

To carry out the roles and functions in the whole country, the cooperative movement in the province formed Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (DEKOPINWIL), and in the district/city they formed Dewan Koperasi Indonesia Daerah (DEKOPINDA). DEKOPINWIL and DEKOPINDA are an integrated part of DEKOPIN.

DEKOPIN based in the Capital of the Republic of Indonesia, Jakarta; there are 33 DEKOPINWIL domiciled in provincial level; and 385 DEKOPINDA that located in the district/city. DEKOPIN membership consists of cooperatives which have legal entities under the following conditions:

- (1) **Secondary cooperatives which members covering all areas of Indonesia or more than in one province register to DEKOPIN.**
- (2) **Primary cooperatives and/or secondary cooperatives which members covering one province or more than one district/city register to DEKOPINWIL.**



(3) Primary cooperatives which members covering one district/city or less register to DEKOPINDA.

DEKOPIN led by a President who is elected from and by the members in National Conference. DEKOPIN embraces collective leadership system in the form of Plenary Leaderships and Daily Leaderships which consists of Vice Presidents and Chairman of Committees. The National Conference also appointed a Board of Supervisory of DEKOPIN for supervising the implementation of policies and the management of DEKOPIN.

In order to provide feedbacks, suggestions and considerations related to cooperative policy and national development, Board of Plenary appoints Advisory Council and Assembly of Experts. Meanwhile, to assist the implementation of the operational tasks, DEKOPIN form the Secretariat General headed by Secretary General.

DEKOPIN also takes part in the international cooperative organization (International Cooperative Alliance – ICA) and regional cooperative organization (Asian Cooperative Organization – ACO). Currently, the President of DEKOPIN also served as Vice President of ICA in Asia and the Pacific.



VISI & MISI (VISION & MISSION)



VISI

DEKOPIN menjadi wahana perjuangan gerakan koperasi yang terpercaya dan memiliki kapasitas yang andal dalam memperjuangkan kepentingan dan menyalurkan aspirasi anggota koperasi menuju terwujudnya jaringan koperasi Indonesia yang sehat dan kuat serta berperan dominan dalam perekonomian nasional.

MISI

- Mengembangkan kapasitas seluruh jajaran lembaga DEKOPIN melalui penerapan good corporate governance yang dilandasi oleh paduan antara pengabdian fungsionaris yang berdedikasi dan kinerja pengelola yang profesional, kompeten, dan berintegritas.
- Menjalankan peran yang signifikan sebagai mitra pemerintah dalam melaksanakan pengembangan koperasi dan perkoperasian di Indonesia.
- Mengembangkan potensi usaha koperasi ke dalam skala dan lingkup ekonomi yang layak, teintegrasi, dan berbasis pada kepentingan anggota serta berorientasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan.
- Meningkatkan kapasitas kelembagaan, tata kelola perusahaan, kualitas sumberdaya manusia, penguasaan teknologi dan perluasan akses permodalan koperasi melalui penyediaan layanan advokasi, fasilitasi, edukasi, sosialisasi dan komunikasi.
- Mengembangkan kerjasama pengembangan koperasi dengan instansi/ lembaga pemerintah, badan usaha dan lembaga pembangunan di dalam dan di luar negeri.

VISION

DEKOPIN becomes a trusted uprising organization for cooperative movement and has reliable capacity in promoting the interests and channeling member's aspirations to create the healthy and strong Indonesian cooperative network as well as has dominant role in national economy.

MISSIONS

- *Developing the capacity of the whole range of DEKOPIN's institution through the implementation of good corporate governance based on the combination of dedicated functionaries devotion and professional, competent, and integrated performance of manager.*
- *Running a significant role as a government partner in implementing the cooperative development in Indonesia.*
- *Developing the potential of cooperative enterprises in a decent, integrated, and interest-based scale and scope of economies, which is oriented to the advancing of economic growth, job creation and poverty eradication.*
- *Enhancing the institution capacity, corporate governance, human resources quality, mastery of technology, and the expansion of capital access for cooperatives by providing advocacy, facilitation, education, socialization, and communication services.*
- *Developing collaboration of cooperative development with government institutions/agencies, business enterprises and development organizations both domestically and internationally.*



PRINSIP DASAR KOPERASI

DEFINISI

Koperasi adalah perkumpulan otonom dari orang-orang yang bersatu secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial dan budaya melalui perusahaan yang mereka miliki bersama dan mereka kendalikan secara demokratis.

NILAI-NILAI

Koperasi berdasarkan nilai-nilai menolong diri sendiri, bertanggung jawab sendiri, demokrasi, kesetaraan dan kesetiakawanan. Mengikuti tradisi pendirinya, anggota koperasi percaya pada nilai-nilai etis, kejujuran, keterbukaan, tangjawab sosial dan kepedulian terhadap orang lain.

PRINSIP-PRINSIP

1. Keanggotaan Sukarela dan Terbuka

Koperasi adalah perkumpulan sukarela, terbuka bagi semua orang yang mampu menggunakan jasa-jasa perkumpulan dan bersedia menerima tanggungjawab keanggotaan, tanpa diskriminasi gender, sosial, rasial, politik dan agama.

2. Pengendalian oleh Anggota secara Demokratis

Koperasi adalah organisasi demokratis, dikendalikan oleh para anggota yang secara aktif berpartisipasi dalam penetapan kebijakan dan pengambilan keputusan. Sebagai wakil-wakil yang terpilih, pria maupun wanita melayani dan bertanggungjawab kepada anggota. Pada tingkat koperasi primer, anggota mempunyai hak suara yang sama (satu orang satu suara). Demikian pula pada tingkatan lain, hak suara juga diatur secara demokratis.

3. Partisipasi Ekonomi Anggota

Anggota memberikan kontribusi modal secara adil dan mengendalikannya secara demokratis. Minimal sebagian dari modal tersebut merupakan milik bersama koperasi. Jika ada, anggota menerima kompensasi terbatas terhadap modal keanggotaan. Para anggota membagi surplus untuk salah satu atau seluruh kepentingan berikut ini:



pengembangan koperasi, kemungkinan menyediakan dana cadangan (sebagian dana tersebut tidak dapat dibagi bagi), pemberian keuntungan kepada anggota sebanding dengan transaksi mereka dengan koperasi, dan mendukung kegiatan lain yang disetujui oleh anggota.

4. Otonomi dan Kemandirian

Koperasi merupakan organisasi yang bersifat otonom, yang mampu menolong diri sendiri dan dikendalikan oleh anggotanya. Jika koperasi mengadakan kesepakatan dengan organisasi lain, termasuk pemerintah, atau memperoleh modal dari sumber eksternal, maka hal tersebut dilaksanakan dengan persyaratan yang menjamin pengendalian anggota secara demokratis dan menjamin otonomi koperasi.

5. Pendidikan, Pelatihan dan Informasi

Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi para anggotanya, wakil yang dipilih, manajer dan karyawan, sehingga mereka dapat memberikan kontribusi secara efektif bagi pengembangan koperasi. Koperasi memberikan informasi kepada masyarakat umum, khususnya kaum muda dan tokoh masyarakat mengenai sifat dan manfaat koperasi.

6. Kerjasama antar Koperasi

Koperasi memberikan pelayanan paling efektif kepada para anggotanya dan memperkuat gerakan koperasi dengan cara bekerja sama melalui struktur lokal, nasional, regional dan internasional.

7. Kepedulian terhadap Masyarakat

Koperasi berperan bagi pengembangan masyarakat yang berkesinambungan melalui kebijakan yang disetujui anggotanya.

PRINCIPLES OF COOPERATIVE

DEFINITION

A cooperative is an autonomous association of persons united voluntarily to meet their common economic, social, and cultural needs and aspirations through a jointly-owned and democratically controlled enterprise.

VALUES

Cooperatives are based on the values of self-help, self-responsibility, equality, equity and solidarity. In the tradition of their founders, cooperative members believe in the ethical values of honesty, openness, social responsibility, and caring for others.

PRINCIPLES

The cooperative principles are guidelines by which cooperatives put their values into practice:

1. Voluntary and Open Membership

Cooperatives are voluntary organizations, open to all persons able to use their services and willing to accept the responsibility of membership, without gender, social, racial, political, or religion discrimination.

2. Democratic Member Control

Cooperatives are democratic organization controlled by their members who actively participate in setting their policies and making decisions. Men or women serving as elected representatives are accountable to the membership. In primary cooperatives, members have the equal voting rights (one member, one vote), and cooperatives at other levels are also organized in a democratic manner.

3. Member Economic Participation

Members contribute equitably to, and democratically control, the capital of their cooperative. At least part of that capital is usually common property of the cooperative. Members usually receive limited compensation, if any, on capital subscribed as a condition of membership. Members allocate surplus for any or all of the following purposes: "developing their

cooperative, possibly by setting up reserves, part of which at least would be indivisible; benefiting members in proportion to their transactions with the cooperative; and supporting other activities approved by the membership."

4. Autonomy and Independence

Cooperatives are autonomous, self-help organizations controlled by their members, if they enter into agreements with other organization, including governments, or raise capital from external sources, they do so on terms that ensure democratic control by their members and maintain their cooperative autonomy.

5. Education, Training and Information

Cooperatives provide education and training for their members, elected representatives, managers and employees so they can contribute effectively to the development of their cooperatives. They inform the general public, particularly young people and opinion leaders about the nature and benefits of cooperation.

6. Cooperation among Cooperatives

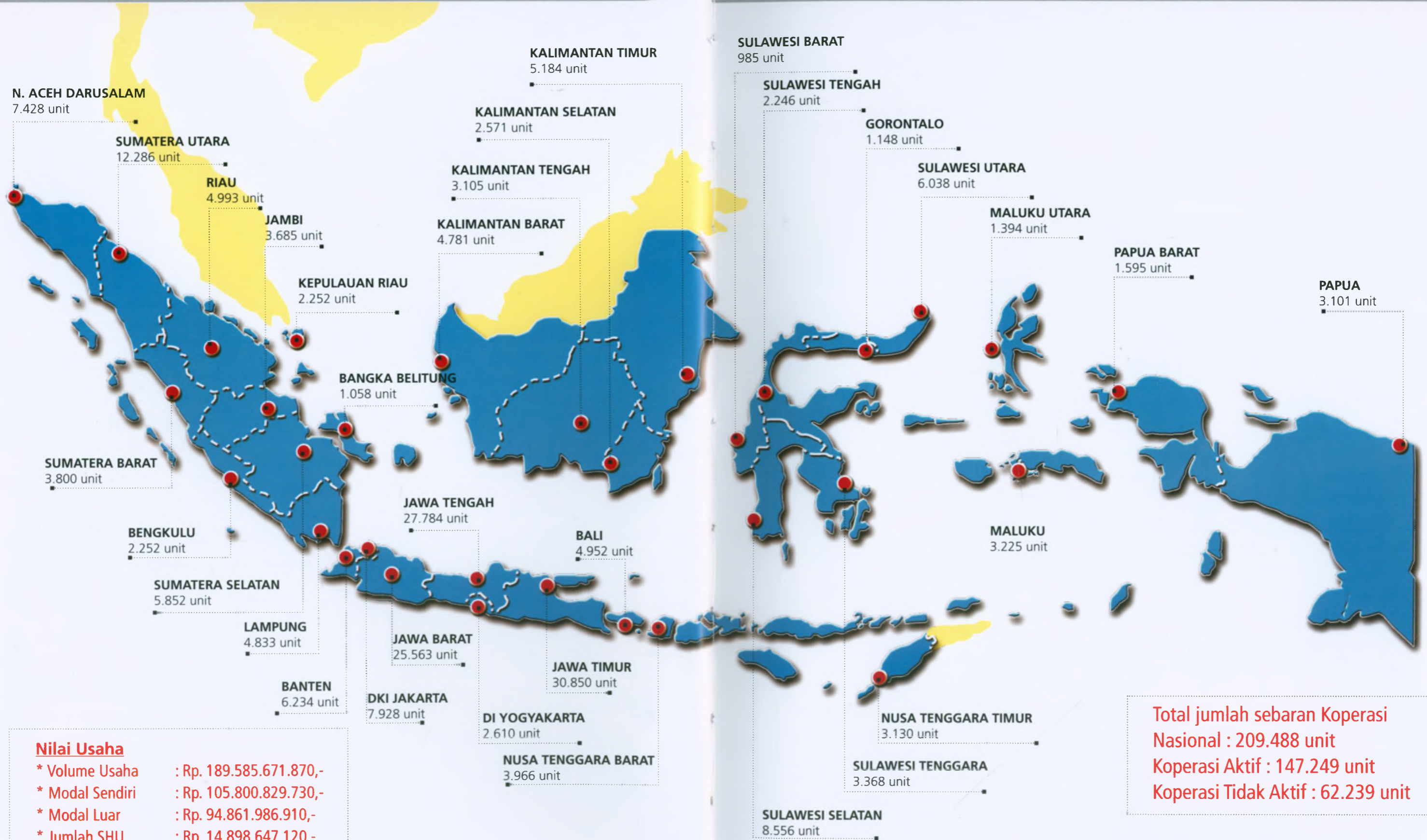
Cooperatives serve their members most effectively and strengthen the cooperative movement by working together through local, national, regional and international structure.

7. Concern for Community

Cooperatives work for sustainable development of their community through policies approved by the members.

SEBARAN KOPERASI INDONESIA

SPREADING OF INDONESIAN COOPERATIVE



Nilai Usaha

- * Volume Usaha : Rp. 189.585.671.870,-
- * Modal Sendiri : Rp. 105.800.829.730,-
- * Modal Luar : Rp. 94.861.986.910,-
- * Jumlah SHU : Rp. 14.898.647.120,-

Total jumlah sebaran Koperasi Nasional : 209.488 unit
Koperasi Aktif : 147.249 unit
Koperasi Tidak Aktif : 62.239 unit

Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM RI
 Source : Ministry of Cooperative and Small Medium Enterprise

PIMPINAN PARIPURNA DEKOPIN MASA BAKTI 2014-2019

PLENARY BOARD OF DEKOPIN 2014-2019

1. H. A.M. Nurdin Halid : Ketua Umum
President
2. Agung Sudjatmoko : Ketua Harian
Deputy President
3. Mohamad Sukri : Wakil Ketua Umum Bid. Organisasi, Daerah, dan Keanggotaan
Vice President for Organization, Regional and Membership
4. Rully Indrawan : Wakil Ketua Umum Bid. Pendidikan, Pelatihan, dan Pengkajian
Vice President for Education, Training and Research
5. H. Nachrowi Ramli : Wakil Ketua Umum Bid. Advokasi, Sosialisasi dan Hubungan Luar Negeri
Vice President for Advocacy, Socialization and Foreign Relation
6. Rahmad Handoyo : Wakil Ketua Umum Bid. Kemaritiman
Vice President for The Maritime Field
7. Sirajuddin Sewang : Wakil Ketua Umum Bid. Ketahanan Pangan, Industri, dan Perdagangan
Vice President for The Fields of Food Security, Industry and Commerce
8. Idris Laena : Wakil Ketua Umum Bid. Permodalan dan Jasa Keuangan
Vice President for Capital Resourcing and Financial Services
9. Arman Arfa : Ketua Komite Organisasi, Keanggotaan
Chairman of Organization and Membership Committee
10. Dina Latifah : Ketua Komite Pembinaan Kelembagaan Wilayah dan Daerah
Chairman of Institutional Development and Regional Committee
11. Pahlevi Pangerang : Ketua Komite Pembinaan Lembaga dan Badan-Badan Khusus
Chairman of Institutions Development and Specialized Agencies
12. Endang Susanto : Ketua Komite Pendidikan dan Pelatihan
Chairman of the Committee of Education and Training
13. Serparius Pandur : Ketua Komite Riset dan Pengembangan Koperasi
Chairman of the Research Committee and Co-operative Development
14. Raliansen Saragih : Ketua Komite Advokasi dan Perundangan
Chairman of the Committee Advocacy and Legislation
15. Anna Susana : Ketua Komite Sosialisasi, Komunikasi, dan TI
Chairman of the Committee Socialization, Communication and TI
16. Insanial Burhansyah : Ketua Komite Hubungan Luar Negeri
Chairman of the Foreign Relations Commission
17. Wibisono Wiyono : Ketua Komite Perikanan dan Sumber Daya Laut
Chairman of the Committee of Fisheries and Marine Resources
18. Yoyok Sunaryo : Ketua Komite Pemberdayaan Masyarakat Nelayan dan Pesisir
Chairman of the Empowerment of Fishermen and Coastal Communities
19. M. Suhaimi : Ketua Komite Infrastruktur Kemaritiman
Chairman of the Committee Maritime Infrastructure
20. Herman Y.L. Wutun : Ketua Komite Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, dan Peternakan
Chairman of the Agriculture Committee, Plantation, Forestry and Animal Husbandry
21. Ambia Bustam : Ketua Komite Industri, Perdagangan, dan Energi
Chairman of the Committee of Industry, Trade and Energy
22. Mahmud Razak : Ketua Komite Kemitraan dan Pengembangan Usaha
Chairman of the Committee Partnerships and Business Development
23. M. Gufron : Ketua Komite Permodalan dan Investasi
Chairman of the Capital and Investment Committee
24. Romanus Wonga : Ketua Komite Simpan Pinjam dan Jasa Keuangan
Chairman of the Committee of Saving Loan and Financial Services
25. Andi Arslan Junaid : Ketua Komite Keuangan dan Usaha Syariah
Chairman of the Finance Committee and Islamic Bussines

26. Andi Firman Rappa : Anggota Komite Organisasi, Keanggotaan
Member, Organization and Membership Committee
27. Jack Paskalis : Anggota Komite Organisasi, Keanggotaan
Member, Organization and Membership Committee
28. Mahadi Bahtera : Anggota Komite Pembinaan Kelembagaan Wilayah dan Daerah
Member, Institutional Development and Regional Committee
29. Marpen Effendi : Anggota Komite Pembinaan Kelembagaan Wilayah dan Daerah
Member, Institutional Development and Regional Committee
30. Emanuel E. Blegur : Anggota Komite Riset dan Pengembangan Koperasi
Member, Research Committee and Co-operative Development
31. Yosef Tortulis : Anggota Komite Riset Pengembangan Koperasi
Member, Research Committee and Co-operative Development
32. Hj. Himmatul Aliyah : Anggota Komite Pendidikan dan Pelatihan
Member, Committee of Education and Training
33. Hj. Munajjah : Anggota Komite Pendidikan dan Pelatihan
Member, Committee of Education and Training
34. Asep Palahuddin : Anggota Komite Pembinaan Lembaga dan Badan-Badan Khusus
Member, Institutions Development and Specialized Agencies
35. Trifina M. Tinal : Anggota Komite Pembinaan Lembaga dan Badan-Badan Khusus
Member, Institutions Development and Specialized Agencies
36. Purwoko J. Soemantri : Anggota Komite Advokasi dan Perundangan
Member, Committee Advocacy and Legislation
37. Abdul Malik Bram : Anggota Komite Advokasi dan Perundangan
Member, Committee Advocacy and Legislation
38. Faqih Asikin : Anggota Komite Sosialisasi, Komunikasi, dan TI
Member, Committee Socialization, Communication and IT
39. Syarifah Noor Hidayati : Anggota Komite Hubungan Luar Negeri
Member, Foregion Relations Commission
40. Yusuf Budi Sartono : Anggota Komite Hubungan Luar Negeri
Member, Foregion Relations Commission
41. Sandra Sugiharto : Anggota Komite Perikanan dan Sumber Daya Laut
Member, Committee of Fisheries and Marine Resources
42. Ropian : Anggota Komite Perikanan dan Sumber Daya Laut
Member, Committee of Fisheries and Marine Resources
43. Ishak Purhawanto : Anggota Komite Infrastruktur Kemaritiman
Member, Committee Maritime Infrastructure
44. Rozak M. Astira : Anggota Komite Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, dan Peternakan
Member, Agriculture Committee, Plantation, Forestry and Animal Husbandry
45. M. Yasir : Anggota Komite Industri, Perdagangan, dan Energi
Member, Committee of Industry, Trade and Energy
46. H. Toto Iskandar : Anggota Komite Industri, Perdagangan, dan Energi
Member, Committee of Industry, Trade and Energy
47. Dwi Purwaningsih : Anggota Komite Kemitraan dan Pengembangan Usaha
Member, Committee Partnerships and Business Development
48. Baihaki A. Majid : Anggota Komite Permodalan dan Investasi
Member, Capital and Investment Committee
49. SH. Johnson : Anggota Komite Simpan Pinjam dan Jasa Keuangan
Member, Committee of Saving Loan and Financial Services
50. Mulyadi : Anggota Komite Simpan Pinjam dan Jasa Keuangan
Member, Committee of Saving Loan and Financial Services
51. Fadlia Farakasi : Anggota Komite Keuangan dan Usaha Syariah
Member, Finance Committee and Islamic Bussines

MAJELIS PAKAR

1. Ketua Majelis Pakar
2. Wakil Ketua I
3. Wakil Ketua II
4. Wakil Ketua III
5. Sekretaris
6. Koord. Bid.
7. Koord. Bid.
8. Koord. Bid.
9. Anggota Member
10. Anggota Member
11. Anggota Member
12. Anggota Member
13. Anggota Member
14. Anggota Member
15. Anggota Member
16. Anggota Member
17. Anggota Member
18. Anggota Member
19. Anggota Member

BOARD OF EXPERTS

- Chairman, Board Of Experts
- Vice Chairman
- Vice Chairman
- Vice Chairman
- Secretary
- Coordinator Of Co-Operative Development
- Coordinator Of Capital Resourcing And Financial Services
- Coordinator Of The Food Security And Industry Commerce
- Nani Zakaria
- Mathius Ta'dung
- Dadang Herli
- Yulhendri
- KH. Marsudi
- Media Warman
- Dehen Erang
- Muhammad Azhari
- Muhajir
- Ramudi Arifin
- Hj. Armi

- Drs. Sularso
- Bangun Surartono
- Arfian Muslim
- Aip Syarifuddin
- Ferrari Roemawi, Mba
- Dr. Suwandi
- Achmad Engkos Kuncoro
- Salim Al Bakry
- Anim Imanuddin
- MA. Warsono
- Subroto
- Suroto
- Muhammad Yazid
- Crist Mawenggang
- Sugawa Kory
- Abdullah Yazid
- Eman Suryaman
- Endang S. Thohari
- Indra Fahmi

PENGAWAS

1. Ketua Pengawas
2. Wakil Ketua Pengawas
3. Sekretaris Pengawas
4. Anggota Pengawas
5. Anggota Pengawas

BOARD OF SUPERVISORY

- Chairman, Board of Supervisory
- Vice Chairman, Board of Supervisory
- Secretary, Board of Supervisory
- Member, Board of Supervisory
- Member, Board of Supervisory

- Drs. H. Mardjito GA
- H. Rianzi Julidar
- Hj. Syahnas Rasyid
- H.M. Thamrin Baso
- Suparwanto

PENASEHAT

1. Ketua Penasehat
2. Penasehat
3. Penasehat
4. Penasehat
5. Penasehat
6. Penasehat
7. Penasehat
8. Penasehat
9. Penasehat
10. Penasehat
11. Penasehat
12. Penasehat
13. Penasehat
14. Penasehat
15. Penasehat
16. Penasehat
17. Penasehat
18. Penasehat

BOARD OF ADVISORS

- Chairman, Board of Advisors
- Vice Chairman
- Member, Board of Advisors
- Member, Board of Advisors
- Member, Board of Advisors
- Member, Board of Advisors
- Member, Board of Advisors
- Member, Board of Advisors
- Member, Board of Advisors
- Member, Board of Advisors
- Member, Board of Advisors
- Member, Board of Advisors
- Member, Board of Advisors
- Member, Board of Advisors
- Member, Board of Advisors
- Member, Board of Advisors
- Member, Board of Advisors
- Member, Board of Advisors

- Dr. Burhanuddin Abdullah
- DR. Ir. M. Jafar Habsyah
- H. Sulaiman L Hamzah
- Ahmad Muzani
- Tamsil Linrung
- Firman Subagyo
- Teguh Boediyana
- Tasripin Mastar
- Hj. Meilani Leimena Suharli
- Herman Khaeron
- Mindo Sianipar
- DR. Ir. H.M. Farid Al Fauzi, MMT
- Hamka B. Kadi
- Heri Gunawan
- Ir. H. Azam Azman Natawijana
- Ir. H. Achmad Hafidz Tohir
- Adisatrya Suryo Sulisto
- Dodi Reza Alex Noerdin

SEKRETARIS JENDERAL

1. Sekeretaris Jenderal
2. Deputi Sekjen
3. Tenaga Ahli Sekjen
4. Direktur Pengembangan, Adm dan Keuangan
5. Direktur Perencanaan, Data dan Informasi

SECRETARY GENERAL

- Secretary General
- Deputy Secretary General
- Experts Secretary General
- Director for Development, Administratiton and Financial
- Director for Planning, Database and Information

- M. Hanafiah Sulaiman
- Ir. Adji Gutomo
- J.M. Sihombing
- H. M. Nasir Manan
- Abdul Wahab



H. A.M. NURDIN HALID
KETUA UMUM



Agung Sudjatmoko
Ketua Harian



Mohamad Sukri
Wakil Ketua Umum Bid.
Organisasi, Daerah dan
Keanggotaan



Rully Indrawan
Wakil Ketua Umum Bid.
Pendidikan, Pelatihan dan
Pengkajian



H. Nachrowi Ramli
Wakil Ketua Umum Bid.
Advokasi, Sosialisasi, dan
Hubungan Luar Negeri



Rahmad Handoyo
Wakil Ketua Umum Bid.
Kemaritiman



Sirajudin Sewang
Wakil Ketua Umum Bid.
Ketahanan Pangan, Indus-
tri dan Perdagangan



Idris Laena
Wakil Ketua Umum Bid.
Permodalan dan Jasa
Keuangan



Burhanudin Abdullah
Ketua Dewan Penasehat



Sularso
Ketua Dewan
Majelis Pakar



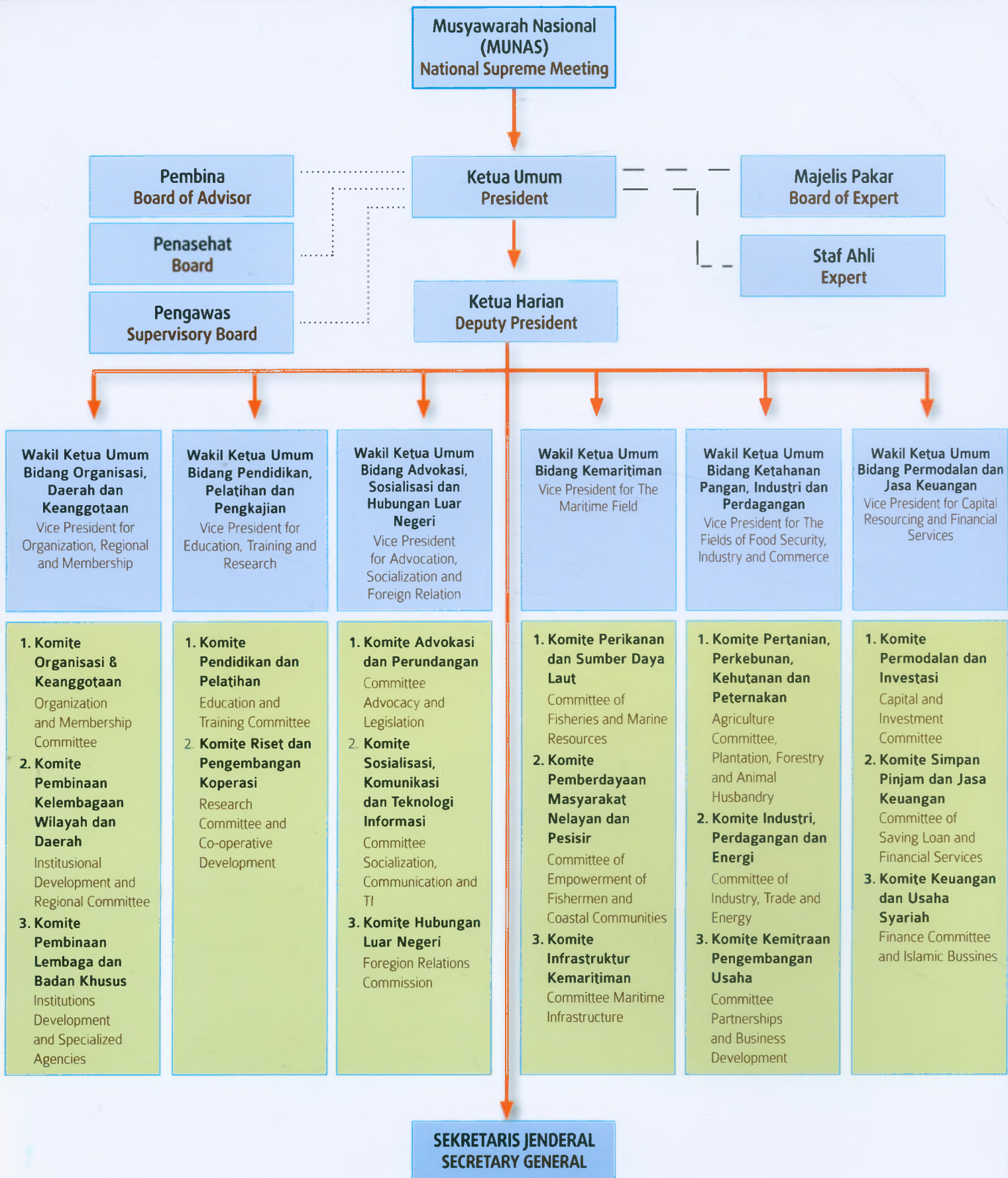
H. Mardjito GA
Ketua Dewan Pengawas



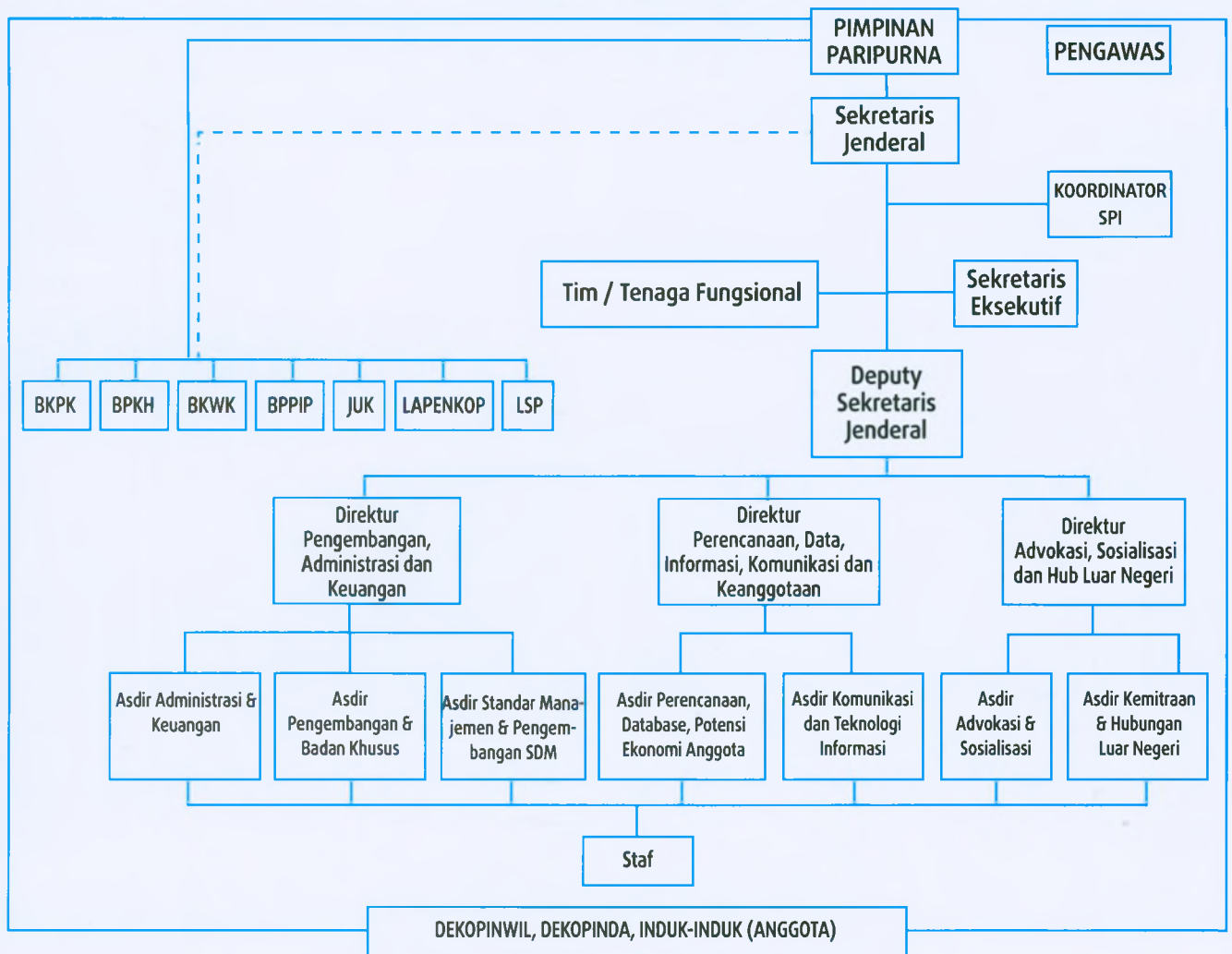
M. Hanafiah Sulaiman
Sekretaris Jenderal

STRUKTUR PIMPINAN PARIPURNA

ORGANIZATION STRUCTURE OF THE BOARD OF CHAIRMAN



STRUKTUR SEKRETARIAT JENDERAL ORGANIZATION STRUCTURE OF THE SECRETARIAT GENERAL



GALLERY





GALLERY





GARIS BESAR PERJUANGAN KOPERASI

Rencana Strategik DEKOPIN 2015-2019 mengindikasikan bahwa kebangkitan koperasi sangat ditentukan oleh kemampuan seluruh masyarakat gerakan koperasi dalam mengaktualisasikan jati dirinya, yaitu: semangat untuk menolong diri sendiri.

Untuk menjawab tantangan mendatang, semangat menolong diri sendiri perlu diterjemahkan ke dalam Garis Besar Perjuangan Koperasi, yang mencakup perpaduan antara tiga unsur elementer sebagai berikut:

Partisipasi; bahwa kebangkitan koperasi merupakan upaya bersama yang didukung oleh partisipasi aktif dari seluruh masyarakat gerakan koperasi. Dengan terciptanya partisipasi yang luas dan berkualitas, kekuatan potensial yang terserak di kalangan koperasi dapat dihimpun dan dibangun menjadi kekuatan riil dalam skala yang besar.

Efisiensi; bahwa berpangkal pada partisipasi yang luas dapat dicapai tingkat efisiensi dan produktivitas yang lebih tinggi melalui pengelolaan usaha berskala besar yang terhubung dalam jaringan usaha koperasi yang terintegrasi.

Keunggulan bersaing; bahwa partisipasi dan efisiensi merupakan bantalan bagi terwujudnya keunggulan bersaing koperasi di pasaran. Keunggulan bersaing koperasi mencerminkan keunggulan dalam memberikan pelayanan usaha kepada masyarakat anggotanya, dan menunjukkan kemampuan koperasi sebagai kekuatan pengimbang di pasaran.



OUTLINE OF COOPERATIVES STRUGGLES

DEKOPIN's Strategic Plan 2015-2019 indicates that the rise of cooperatives is largely determined by the ability of the cooperative movement in the whole community to actualize his identity, namely: the spirit to help themselves or self help spirit

To answer the next challenge, the spirit of self-help needs translated into Struggle Outline Cooperative, which includes a combination of three elementary elements as follows:

Participation; that the revival of cooperatives is a joint effort supported by the active participation of the entire community of the cooperative movement. With the creation of broad participation and quality, the potential power that can be scattered among the cooperatives collected and built into a real force in large scale.

Efficiency; that originates on a broad participation can be achieved levels of efficiency and higher productivity through the management of large-scale businesses that are connected in an integrated network of cooperative business.

Competitive advantage; that participation and efficiency is a cushion for the establishment of cooperative competitive advantage in the market. Reflect the competitive advantage of the benefits of cooperative efforts in providing services to the community members, and demonstrate the ability of cooperatives as a power balancer in the market.

PROGRAM BERJALAN

1. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN

Menyempurnakan struktur organisasi DEKOPIN 2010-2014, mengisi formasi kepengurusan dan eksekutif, dan melengkapi struktur organisasi dengan job description yang utuh dan menyeluruh.

Mempersiapkan gedung kantor DEKOPIN yang layak dan mampu mendukung pelaksanaan kegiatan dan konsolidasi pengembangan koperasi.

Menyempurnakan Anggaran Dasar dan Anggaran rumah Tangga DEKOPIN, merumuskan RENSTRA DEKOPIN 2015-2019, dan Program Tahunan DEKOPIN Tahunan (2015)

Menerapkan prinsip good corporate governance dan menegakkan prinsip akuntabilitas dalam seluruh sistem tata kelola DEKOPIN, termasuk badan-badan internal BKWK BKPK, BPKH, BPPIP, LAPENKOP, dan JUK.

Menyempurnakan tata-kelola kepersonaliaan DEKOPIN dan menata kembali proses rekrutmen, penempatan, mutasi jabatan, renumerasi, dan ketentuan kepersonaliaan yang terkait.

Menginventarisasi status keanggotaan DEKOPIN di tingkat pusat dan wilayah/daerah sebagai bahan masukan untuk mengoptimalkan fungsi dan peran DEKOPIN dalam pelaksanaan kegiatan advokasi, intermediasi, fasilitasi, asistensi, informasi-komunikasi dan sosialisasi.

Meningkatkan peran dan fungsi DEKOPINWIL dan DEKOPINDA sebagai mitra Terpercaya pemerintah daerah dalam rangka pengembangan koperasi.



PROGRAM IN PROGRESS

1. INSTITUTIONAL CAPACITY IMPROVEMENT PROGRAM

Enhancing organizational structure of DEKOPIN 2010-2014, to fill management and executive formation, and complement the organizational structure with job a full and comprehensive description.

Preparing DEKOPIN office building a viable and capable for supporting the implementation of the consolidation and development of cooperatives.

Revising the Articles of Association and Bylaws DEKOPIN, formulate Strategic Planning of DEKOPIN 2015-2019, and Annual Program of DEKOPIN (2015).

Applying the principles of good corporate governance and upholding the principle of accountability in the whole system of governance DEKOPIN, including internal bodies as BKWK, BKPK, BPKH, PIP, LAPENKOP, and JUK.

Improving governance and re-arrange DEKOPIN HR recruitment, placement, rotation of office, remuneration and related provisions of HR.

An inventory of DEKOPIN membership status at the central level and the area/region as input to optimize the function and role in the implementation of advocacy activities DEKOPIN, intermediation, facilitation, assistance, information-communication and socialization.

Enhance the role and function DEKOPINDA DEKOPINWIL and local governments as a trusted partner in developing co-operatives.



PROGRAM BERJALAN

2. PROGRAM ADVOKASI, INTERMEDIASI dan SOSIALISASI

Berpartisipasi aktif dalam mempersiapkan RUU Perkoperasian sebagai pengganti UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan RUU Perekonomian Nasional untuk dibahas oleh DPR-RI; dan menyediakan narasumber yang kompeten untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembahasan.

Menjalankan kegiatan intermediasi untuk meningkatkan dan memperluas akses gerakan koperasi dengan lembaga eksekutif dan legislatif pada semua tingkatan.

Melaksanakan advokasi kepada koperasi-koperasi sekunder tingkat nasional (Induk) anggota DEKOPIN dalam rangka pemecahan masalah di bidang kelembagaan, legalitas badan usaha, dan hukum.

Sosialisasi peraturan dan atau kebijakan di bidang perkoperasian, usaha riil, keuangan ketenagakerjaan, lingkungan hidup termasuk kebijakan publik lainnya dan peraturan daerah; dan melaksanakan advokasi untuk mengoreksi peraturan dan atau kebijakan yang merugikan koperasi.

Sosialisasi tentang penerapan jatidiri dalam rumusan tatakelola perusahaan koperasi, penerapan prinsip akuntabilitas dan good corporate governance.

Sosialisasi tentang prosedur pembentukan, pemusatan, merger/amalgamasi, dan pembubaran koperasi, serta melaksanakan advokasi untuk menanggulangi kesalahan prosedur dan atau mal-praktek koperasi.

3. PROGRAM FASILITASI DAN ASISTENSI USAHA

Mengintensifkan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan dunia usaha agar koperasi mampu merebut peluang usaha serta

memperoleh perlakuan yang setara dalam akses sumberdaya

Memfasilitasi gerakan koperasi untuk mengembangkan usaha yang layak dan terintegrasi di (i) jasa keuangan (simpan pinjam/perkreditan, jasa jaminan, jasa pegadaian, dan jasa asuransi); (ii) bidang agribisnis (pertanian tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan perikanan, hortikultura dan obat-obatan); (iii) bidang perdagangan (distribusi sarana produksi, pengelolaan pasar komoditi, dan distribusi bahan pokok rakyat); (iv) bidang industri pengolahan (pengolahan makanan dan manufaktur) dan (v) bidang pertambangan (tambang rakyat).

Meningkatkan peran dan kinerja badan jaringan usaha koperasi (badan JUK DEKOPIN) sebagai trading house yang bersekala nasional dan internasional untuk mendukung pengembangan integrasi usaha koperasi.

Memfasilitasi koperasi dalam meningkatkan akses permodalan dengan pihak perbankan/lembaga keuangan lainnya, serta pengembangan kerjasama investasi koperasi dengan mitra terpercaya.

Menyediakan bantuan intermediasi dan asistensi manajemen kepada koperasi dalam rangka penyehatan dan atau pengembangan usaha termasuk dalam rangka penciptaan integrasi usaha dengan koperasi primer atau sekunder bawahannya.

Menyediakan bantuan intermediasi dan asistensi kepada koperasi dalam pengembangan sistem informasi bisnis dan pemanfaatan teknologi informasi dan pengelolannya untuk mendukung pengembangan integrasi usaha koperasi.

PROGRAM IN PROGRESS

2. ADVOCACY, INTERMEDIATION AND SOCIALIZATION PROGRAM

Participate actively in preparing the draft Cooperatives in lieu of Law Number 25 Year 1992 concerning Cooperatives and the Bill of National Economy to be discussed by Representatives; and provide competent resource persons to participate actively in the discussion process.

Running the intermediation activities to improve and expand access to the cooperative movement with the executive and legislative institutions at all levels.

Carry out advocacy to secondary co-operatives national level as DEKOPIN members in order to solve the problem in the field of institutional, legal entities, and law.

Socialization and regulations or policies in the field of co-operatives, the real business, financial, employment the environment including other public policies and local regulations; and carry out advocacy for the appropriate rules and policies that harm the cooperative.

Socialization of the applying identity in the formulation of cooperative enterprise governance, applying the principle of accountability and good corporate governance.

Socialization of the formation procedure, convergence merger/ amalgamation, and dissolution of cooperatives, as well as carrying out advocacy to overcome the procedural mistake or mal-practices and cooperative.

Facilitate co-operative movement to develop a viable and integrated efforts in (i) financial services (savings and loans/credit collateral services, mortgage services, and insurance services), (ii) agribusiness (food crop agriculture, plantation, forestry, animal husbandry, fishery, horticulture and medicine), (iii) the field of trade (the distribution of production facilities, management of commodity markets, and distribution of public goods); (iv) of processing industry (food processing and manufacturing) and (v) mining (mining folk).

Enhance the role and performance of co-operative business network entity (entity refers DEKOPIN) as a trading house which nationally and internationally scales to support the development of co-operative business integration.

Facilitate cooperation in improving access to capital with banks/other financial institutions, and development of cooperative investment in cooperation with reliable partners.

Provide support and assistance intermediary to co-operative management in order to create healthier and/or business development including the creation of integration within the framework of co-operative efforts with primary or secondary subordinates.

Provide support and assistance to co-operatives intermediation in business information systems development and use of information technology and management to support the development of cooperative business integration.

3. ASSISTANCE AND TRADE FACILITATION PROGRAM

To intensify coordination and consultation with government agencies and businesses to co-operatives to seize business opportunities and get equal treatment in access to resources.

PROGRAM BERJALAN

4. PROGRAM PENINGKATAN PERAN WANITA DAN PEMUDA KOPERASI

Peningkatan peran pemuda koperasi dalam pengembangan usaha agro-forestry yang berorientasi pada produksi pangan dan pengembangan energi alternatif.

Peningkatan peran wanita koperasi dalam pengembangan jaringan usaha jasa keuangan dan industri kreatif mandiri.

Fasilitasi dan penguatan kapasitas koperasi di kalangan wanita dan pemuda dalam rangka pengembangan usaha yang berbasis komoditi unggulan daerah.

Pengembangan pola komunikasi dalam rangka peningkatan kesadaran dan partisipasi berkoperasi serta penumbuhan citra koperasi di kalangan wanita dan generasi muda.

Penataan dan peningkatan kerja Badan Komunikasi Pemuda Koperasi (BKPK) dan Badan Komunikasi Wanita Koperasi (BKWK).

5. PROGRAM PENGEMBANGAN SDM

Pengembangan kurikulum pendidikan formal perkoperasian, modul pelatihan kompetensi/keterampilan dan manajerial, modal pengembangan kewirausahaan koperasi, sistem pengelolaan inkubator bisnis koperasi, dan system pengelolaan lembaga pendidikan koperasi.

Pengembangan modul penyuluhan dan sosialisasi perkoperasian bagi anggota koperasi dan calon anggota koperasi serta masyarakat pada umumnya.

Penataan dan peningkatan kinerja badan LAPENKOP DEKOPIN di semua tingkatan.

Pengembangan pendidikan, penyuluhan dan sosialisasi perkoperasian melalui massmedia

(antara lain: media cetak, media elektronik, internet/website), event kesenian dan da'wah keagamaan.

Pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan perkoperasian berwawasan pengarusutamaan gender dan generasi muda di kalangan gerakan koperasi dan masyarakat pada umumnya.

Pelaksanaan program pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi/keterampilan spesifik dan manajerial berbasis usaha koperasi.

Pelaksanaan kegiatan pelatihan bagi tenaga pengelola inkubator bisnis koperasi dan pengelola lembaga pendidikan/pelatihan koperasi.

Pengembangan kerjasama pendidikan/pelatihan perkoperasian dengan lembaga pendidikan/pelatihan di dalam negeri dan luar negeri.

6. PROGRAM KOMUNIKASI & INFORMASI

Mengembangkan infrastruktur informasi elektronik koperasi (e-coop) sebagai media komunikasi DEKOPIN yang terhubung secara on-line dengan DEKOPINWIL, DEKOPINDA, masyarakat gerakan koperasi, dan masyarakat dunia usaha pada umumnya.

Meningkatkan kinerja dan peran BPPIP melalui penataan ulang dalam pengelolaan organisasi, usaha dan keuangan, teknik produksi, peningkatan tiras dan penegakkan akuntabilitas, Mengefektifkan pemanfaatan website resmi DEKOPIN (<http://www.dekopin.or.id>) sebagai portal perkoperasian yang lengkap.

Memanfaatkan massmedia secara tepat dan proporsional sebagai wahana kehumasan DEKOPIN dalam rangka pembentukan opini dan pencitraan gerakan koperasi pada publik.

PROGRAM IN PROGRESS

4. IMPROVEMENT ROLE OF WOMEN AND YOUTH COOPERATIVES PROGRAM

Increasing the role of youth co-operatives in agro-forestry business development-oriented food production and alternative energy development.

Increasing women's role in the development of co-operative business network of financial services and creative industries independent.

Facilitation and strengthening the capacity of co-operatives among women and youth in developing commodity based business area.

Development of communication patterns in order to increase awareness and participation as well as growing the image of co-operatives among women and youth. Structuring and improving operations Co-operative Youth Communication Agency (BKPK) and the Women Cooperator Communication Committee (BKWK).

(including: print media, electronic media, internet/ website), arts events and religious.

Implementation of education, training and co-operative education with vision of gender mainstreaming and youth among the co-operative movement and society in general. Implementation of training programs in order to improve the competency/ skillspecific and managerialbased co-operative effort.

Implementation of training activities for personnel business incubator manager and manager of the co-operative educational institution/co-operative training.

Development of educational cooperation/co-operative training with educational institutions/ training domestically and overseas.

5. HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROGRAM

Development of a formal co-operative education curriculum, training modules competencies/ skills and managerial capital, entrepreneurial development of co-operatives, co-operative business incubator management systems, and system management of the co-operative educational institution.

Development and socialization of co-operative extension module for co-operative members and prospective members of the co-operative and the community at large.

Structuring and performance improvement agencies at all levels LAPENKOP DEKOPIN.

Development of education, co-operative education and socialization through massmedia

6. COMMUNICATION AND INFORMATION PROGRAM

Developing an electronic information infrastructure cooperation (ecoop) as a communication medium DEKOPIN which connected online with DEKOPINWIL, DEKOPINDA, community co-operative movements, and public business world in general.

Improve the performance and the role of PIP through rearrangement in organizational management, business and finance, production techniques, increase circulation and enforcement of accountability

Optimization DEKOPIN official website (<http://www.dekopin.or.id>) as a complete portal co-operatives.

Utilizing mass-media appropriately and proportionately as a vehicle for public relations in order DEKOPIN opinion formation and imaging of the co-operative movement to the public.

PROGRAM BERJALAN

Mengembangkan kegiatan publikasi buku-buku tentang perkoperasian, kewirausahaan, manajemen koperasi, kesejarahan, autobiografi, dan bukubuku populer lainnya, baik yang bersumber dari naskah asli, saduran atau terjemahan.

Mendirikan perpustakaan perkoperasian dan mengembangkan pusat data informasi perkoperasian.

Menyelenggarakan seminar/ lokakarya/ symposium tentang perkoperasian, perekonomian, manajemen, financial, sosiologi pertanian dan sebagainya untuk menghimpun komunitas koperasi di kalangan masyarakat madani dan masyarakat terpelajar.

7. PROGRAM KERJASAMA DOMESTIK DAN INTERNASIONAL

Memfasilitasi pengembangan kerjasama usaha yang saling menguntungkan antar sesama koperasi, dan antara koperasi dengan badan usaha swasta dan atau badan usaha negara.

Menciptakan kerjasama dalam rangka pengembangan koperasi di bidang pendidikan, pelatihan kompetensi/keterampilan, pertukaran tenaga kerja, dan pelaksanaan pengkajian dengan lembaga pembangunan di dalam dan luar negeri.

Memfasilitasi koperasi untuk mengembangkan kerjasama dengan koperasi terkemuka di luar negeri di bidang pertanian, perdagangan, keuangan dan industri.

Mengefektifkan peranan DEKOPIN pada lembaga ICA dan ACO; serta mengembangkan hubungan dengan lembaga internasional, seperti: World Bank, ADB, UNDP, ILO, FAO, dan lembaga-lembaga pembangunan bertaraf internasional lainnya.



8. PROGRAM PENGAJIAN & PENGEMBANGAN

Melaksanakan kegiatan kajian strategik di bidang ekonomi, financial, tata-kelola perusahaan, kelembagaan dan sumberdaya manusia untuk memperkuat dasar-dasar akademis dalam rangka pengembangan peran usaha koperasi. Merumuskan kesisteman akuntansi, financial, kepersonaliaan, teknik produksi/pengolahan, logistik, pemasaran, dan manajemen resiko yang bertalian dengan pengembangan peran usaha koperasi.

Mengembangkan pilot proyek inkubator bisnis berbasis koperasi sebagai media pengembangan usaha dan kewirausahaan koperasi.

Mengadakan inventarisasi terhadap hasil kajian perkoperasian atau kajian yang berhubungan dengan koperasi yang dilakukan oleh instansi/ lembaga lain; dan menyusun system database kajian perkoperasian.

Melakukan sosialisasi atas hasil kajian strategik, kesisteman dan paket sistem prosedur, baik melalui jalur pendidikan/pelatihan maupun penyuluhan anggota koperasi.

PROGRAM IN PROGRESS

Develop a publicity activity books on co-operatives, entrepreneurship, co-operative management, historical, autobiographical, and other popular books, whether sourced from original manuscript, adaptations or translations.

Establish a library co-operatives and co-operatives to develop data center information.

Organizing seminars/ workshops/ symposia regarding co-operatives, economics, management, finance, sociology, agriculture and so forth to gather community co-operatives among civil society and educated .

7. DOMESTIC AND INTERNATIONAL CO-OPERATION PROGRAM

Facilitate the development of mutually beneficial business cooperation among co-operatives, and between the co-operative and private business entities and I or state enterprises.

Creating cooperation within the framework of development cooperation in education, training, competency/skills, labor exchange, and assessment conducted by development agencies within and outside the country.

Facilitate co-operative to develop cooperation with the leading co-operatives outside the country in agriculture, trade, finance and industry.

Making DEKOPIN role in the ICA and ACO institutions, and to develop relationships with international institutions, such as: the World Bank, ADB, UNDP, ILO, FAO, and the institutions of other international development.

8. ASSESSMENT AND DEVELOPMENT PROGRAM

Carry out a strategic review of activities in the field of economic, financial, corporate governance, institutional and human resources to strengthen academic foundations in order to develop the role of cooperative business.

Formulate systemic accounting, financial, HR, production engineering/manufacturing, logistics, marketing and risk management related to the development of co-operative business role.

Develop a pilot project for cooperative-based business incubator as a media co-operative enterprise development and entrepreneurship.

Conduct an inventory of the results of the study co-operatives or cooperative-related studies conducted by other agencies/institutions, and developing data-base system of co-operative study.

To socialize the results of strategic studies, systemic and procedural systems package, either through education/training and counseling members of the co-operative.



TAHAPAN PELAKSANAAN PROGRAM

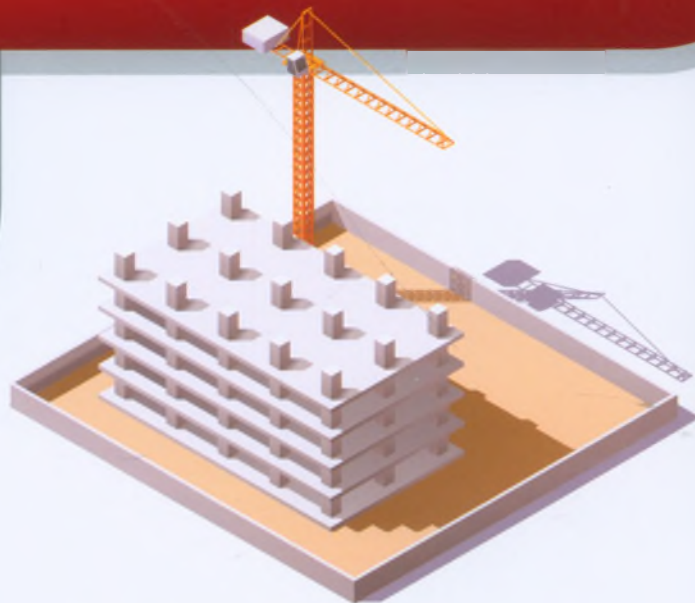
RENSTRA DEKOPIN 2015-2019
diimplementasikan ke dalam Program Kerja Tahunan dengan tahapan sebagai berikut:

Tahapan Pertama (Tahun 2015):

Dalam tahapan pertama ini dilakukan upaya menyusun basis yang realistis untuk menopang peningkatan kinerja DEKOPIN selama 5 tahun kedepan. Kegiatan konsolidasi akan dititikberatkan pada penataan ulang mekanisme, tata-kelola kelembagaan, dan penataan badan-badan internal agar dapat menampilkan kinerja yang efektif, responsif, akuntabel, kompeten dan profesional. Sedangkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang advokasi, intermediasi, fasilitasi, asistensi, edukasi, sosialisasi, informasi-komunikasi dan pengkajian akan dicurahkan pada pemecahan masalah perkoperasian yang bersifat mendesak dan perumusan road-map dan rincian komprehensif implementasi program dalam rangka pelaksanaan RENSTRA DEKOPIN 2015-2019. Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan untuk mempertajam prioritas program tahunan yang mendatang.

Tahapan Kedua (Tahun 2016):

Dalam tahapan kedua, kegiatan penataan mekanisme dan tata-kelola kelembagaan DEKOPIN akan dilanjutkan pada tingkat DEKOPINWIL dan DEKOPINDA agar mampu meningkatkan peran dan fungsinya dalam menggali dan memanfaatkan potensi koperasi di wilayahnya. Dalam rangka pengembangan koperasi, kegiatan advokasi, intermediasi, fasilitasi, asistensi, edukasi, sosialisasi, informasi-komunikasi dan pengkajian akan diarahkan pada peningkatan kapasitas koperasi-koperasi sekunder tingkat nasional yang terpilih untuk mengembangkan usaha yang layak, terintegrasi, dan berbasis pada kepentingan ekonomi anggota di tingkat koperasi primer (distribusi sarana produksi pertanian, pengadaan dan distribusi kebutuhan pangan, dan jasa keuangan). Langkah outsourcing untuk pembiayaan pengembangan koperasi dan permodalan koperasi dilakukan melalui peningkatan hubungan koordinasi dan kerjasama



dengan instansi/lembaga pemerintah, badan usaha swasta dan badan usaha milik negara, perbankan/ lembaga keuangan dan badan pembangunan yang terkait. Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan untuk mempertajam prioritas program tahunan yang mendatang.

Tahapan Ketiga (Tahun 2017):

Dalam tahapan ketiga, kelembagaan DEKOPIN telah memiliki kapasitas penuh untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Pelaksanaan fungsi advokasi, intermediasi, fasilitasi, asistensi, edukasi, informasi-komunikasi, sosialisasi dan pengkajian lebih ditingkatkan untuk memantapkan dan meningkatkan program pengembangan koperasi yang sedang berjalan; dan memperluas pengembangan usaha yang layak, terintegrasi, dan berbasis kepentingan ekonomi anggota di tingkat koperasi primer terutama di bidang agribisnis (perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan, hortikultura dan obat-obatan), jasa perdagangan (pengelolaan pasar komoditi), jasa keuangan (perkreditan, pegadaian, dan asuransi) industri pengolahan pangan dan industri komponen. Dalam tahapan ini, langkah outsourcing pembiayaan pengembangan dan permodalan koperasi ditempuh melalui peningkatan hubungan koordinasi dengan instansi/lembaga pembina koperasi yang terkait; dan penciptaan kerjasama usaha antar koperasi serta antara koperasi dengan badan usaha dan perbankan/ lembaga keuangan, baik di dalam maupun di luar negeri. Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan secara konsisten untuk mempertajam prioritas program tahunan mendatang.

STEPS OF THE PROGRAM IMPLEMENTATION

DEKOPIN's strategic plan will be implemented into the 2015-2019 and the Annual Work Program with the following stages:

First Stage (year 2015):

In the first phase of this effort is to develop a realistic basis to sustain DEKOPIN performance improvement over five years. Consolidation of activities will be centered on rearrangement mechanisms, institutional governance, and restructuring of internal bodies in order to display an effective performance, responsive, accountable, competent and professional. While the implementation of the basic tasks and functions in the areas of advocacy, intermediation, facilitation, assistance, education, socialization, information, communication and assessment will be poured on co-operative problem solving that are urgent and formulation road-map and details of a comprehensive implementation program for the implementation of DEKOPIN's strategic plan 2015-2019. Monitoring and evaluation activities conducted to sharpen the upcoming annual program priorities.

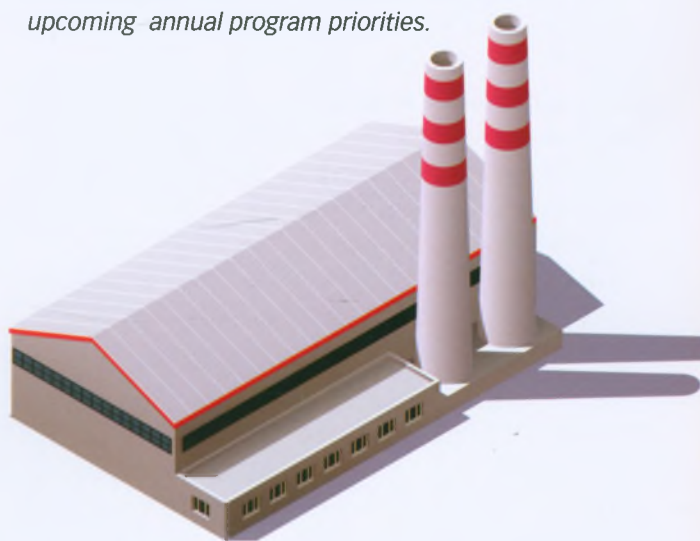
Second stage (year 2016):

In the second stage, the activities of structuring mechanisms and institutional governance will be continued at the level DEKOPIN DEKOPINWIL and DEKOPINDA to be able to enhance the role and function in exploring and exploiting the potential of co-operatives in the region. In the framework of co-operative development, advocacy activities, intermediation, facilitation, assistance, education, socialization, information, communication and assessment will be directed at increasing the capacity of secondary co-operatives nationally who were selected to develop a decent effort, integrated, and based on members' economic interests at the level of primary co-operatives (the distribution of agricultural inputs, procurement and distribution of food needs, and financial services). In outsourcing step for financing the development of co-operatives and co-operative capital through increasing coordination

and cooperation in relations with institutions and agencies of government, private business entities and state enterprises, banking/financial institutions and development agencies concerned. Monitoring and evaluation activities conducted to sharpen the upcoming annual program priorities.

Third stage (Year 2017):

In the third stage, institutional DEKOPIN has full capacity to perform basic tasks and functions. Implementation of advocacy function, intermediary, facilitation, assistance, education, information-communication, socialization and assessment be improved to strengthen and enhance co-operative development programs that are running; and expand the business development of appropriate, integrated, and based on members' economic interests at the level of primary co-operatives especially in the areas of agribusiness (agriculture, fisheries, animal husbandry, forestry, horticulture and pharmaceuticals), services trade (commodity market management), financial services (credits, pawnshops, and insurance), food processing industry and industrial components. In this phase, the step of outsourcing finance and capital development of co-operative relations pursued through increased coordination with other agency / institutions associated builder co-operatives, and creation of business cooperation between co-operatives and the co-operative enterprise and banking / financial institutions, both inside and outside the country. Monitoring and evaluation activities performed consistently to sharpen the upcoming annual program priorities.

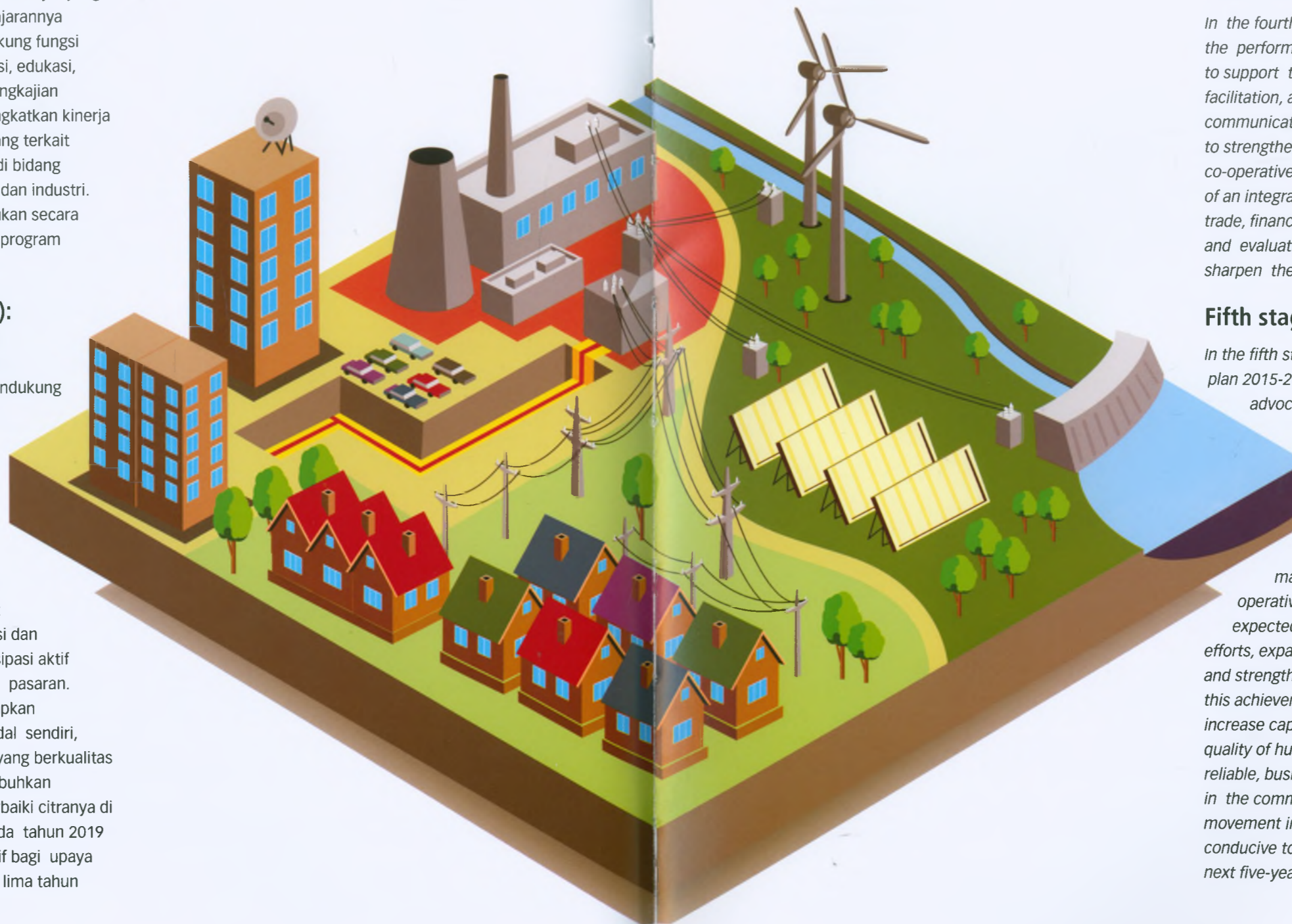


Tahapan Keempat (2018):

Dalam tahapan keempat, segenap sumberdaya yang tersedia dan kinerja DEKOPIN beserta jajarannya dicurahkan secara penuh untuk mendukung fungsi advokasi, intermediasi, fasilitasi, asistensi, edukasi, informasi-komunikasi, sosialisasi dan pengkajian dalam rangka memantapkan dan meningkatkan kinerja seluruh koperasi di semua tingkatan yang terkait dalam implementasi usaha terintegrasi di bidang agribisnis, perdagangan, jasa keuangan dan industri. Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan secara konsisten untuk mempertajam prioritas program tahunan mendatang.

Tahapan Kelima (2015-2019):

Dalam tahapan kelima atau tahapan terakhir RENSTRA DEKOPIN 2015-2019, seluruh kegiatan difokuskan untuk mendukung fungsi advokasi, intermediasi, fasilitasi, asistensi, edukasi, informasi-komunikasi, sosialisasi dan pengkajian dalam rangka memantapkan dan mengkonsolidasikan kinerja koperasi pada sektor usaha agribisnis, perdagangan, jasa keuangan dan industri pengolahan. Peranan koperasi pada empat sektor usaha inti tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas usaha, memperluas partisipasi aktif anggota, dan memperkuat daya saing di pasaran. Dengan pencapaian itu, koperasi diharapkan mampu meningkatkan pemupukan modal sendiri, meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan kewirausahaan yang andal, menumbuhkan kepercayaan dunia usaha, dan memperbaiki citranya di masyarakat. Sosok gerakan koperasi pada tahun 2019 diharapkan dapat menjadi basis kondusif bagi upaya pengembangan koperasi untuk tahapan lima tahun selanjutnya.



Fourth stage (2018):

In the fourth stage, all the resources available and the performance of its staff DEKOPIN devoted fully to support the advocacy function, intermediary, facilitation, assistance, education, information-communication, socialization and assessment in order to strengthen and improve the performance of all co-operatives at all levels involved in implementation of an integrated effort in the field of agribusiness, trade, financial services and industry. Monitoring and evaluation activities performed consistently to sharpen the upcoming annual program priorities.

Fifth stage (2015-2019):

In the fifth stage or last stage of DEKOPIN's strategic plan 2015-2019, all activities focused to support the advocacy function, intermediary, facilitation, assistance, education, information-communication, socialization and assessment in order to strengthen and consolidate the performance of co-operatives in the agribusiness sector, trade, services financial and manufacturing industries. The roles of co-operatives in four core business sectors are expected to increase efficiency and productivity efforts, expanding the active participation of members, and strengthen competitiveness in the market. With this achievement, the co-operative is expected to increase capital accumulation itself, improve the quality of human resources and entrepreneurship is reliable, business confidence, and improves its image in the community. The figure of the co-operative movement in the year 2019 is expected to be a base conducive to co-operative development efforts for the next five-year phases.



Badan Pelaksana

Untuk melaksanakan tugas DEKOPIN dalam menjalankan fungsi edukasi, fasilitasi dan advokasi, maka dibentuk badan-badan pelaksana khusus, sebagai berikut:

LEMBAGA PENDIDIKAN PERKOPERASIAN (LAPENKOP)

Lembaga Pendidikan Perkoperasian (Lapenkop) dibentuk pada 24 Mei 1995. Kehadiran lembaga ini, merupakan jawaban terhadap salah satu masalah mendasar koperasi, yaitu rendahnya kesadaran anggota dan kemampuan pengelola koperasi.

Tujuan:

Lapenkop telah mengembangkan materi dan metode pelatihan anggota dan pengelola koperasi profesional, serta pemandu pelatihan yang handal. Materi tersebut telah digunakan oleh gerakan koperasi di beberapa negara lain. Lapenkop memiliki jaringan pendidikan dan pelatihan di sejumlah provinsi dan kabupaten/kota.

Kegiatan:

1. Merancang sistem dan kurikulum pendidikan perkoperasian.
2. Merancang dan menerbitkan bahan-bahan pendidikan perkoperasian berikut alat bantu.
3. Mempersiapkan pelatih dan pemandu.
4. Membangun jaringan kerja dalam gerakan koperasi untuk melaksanakan pendidikan perkoperasian.
5. Melaksanakan sistem pelatihan dengan magang (learning by doing) di dalam maupun di luar

Executing Bureaus

To undertake DEKOPIN's tasks in performing function of education, facilitation and advocacy, DEKOPIN set up specific executive bureaus, as follow:

COOPERATIVE EDUCATIONAL INSTITUTION (LAPENKOP)

Cooperative Educational Institution (Lapenkop) was established on 24th May 1995. The existence of this institution is the answer to one of the cooperative basic issues, which is the lack of member's awareness and the ability of cooperative's managers.

Goals:

Lapenkop has developed training materials and methods for members, professional cooperative managers, and reliable preceptors. The materials have been used by cooperative movement is several other countries. It has education and training network in some provinces and districts/cities.

Activities:

1. Designing cooperatives education and curriculum.
2. Designing and publishing cooperatives education materials and also its tools.
3. Preparing trainers and preceptors.
4. Building working network in cooperative movement to conduct cooperative education.
5. Implementing the training using internship system (learning by doing) both domestically and inter-



negeri.

Alamat:

Kampus IKOPIN

Jalan Raya Bandung Sumedang KM. 20,5, Jatinangor, Bandung 40600

Telp. 022 779 8361 (Hunting) Faks. 022 779 8362

LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI KOPERASI

Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Koperasi menjalankan kegiatan sertifikasi bagi para pengelola koperasi. Melalui sertifikasi, koperasi bisa dikembangkan ke arah penerapan manajemen profesional, karena pengelolanya mempunyai kemampuan yang memadai untuk mengembangkan usaha dan lembaga koperasi. Untuk dapat menjangkau koperasi di seluruh Indonesia, LSP mengembangkan jaringan di seluruh wilayah dan daerah Indonesia.

Tujuan:

1. Meningkatkan dan membuat standarisasi kompetensi pengelola koperasi.
2. Membangun profesionalisme manajemen koperasi.
3. Membantu koperasi memasuki era persaingan pasar bebas.

nationally.

Address:

IKOPIN College

Jl. Raya Bandung Sumedang KM. 20,5, Jatinangor, Bandung 40600

Phone. 022 779 8361 (hunting) Fax. 022 779 8362

PROFESSIONAL CERTIFICATION INSTITUTION OF COOPERATIVE

Professional Certification Institution (LSP) of Cooperative runs certification activities for cooperatives managers. Through the certification, cooperative could be developed towards professional management implementation, because the managers have adequate capability to expand cooperative's institutions and enterprises. To be able to reach out cooperatives all over Indonesia, LSP develop the network in all areas and regions of Indonesia.

Goals:

1. Increasing and making standardization of cooperative managers' competence
2. Building cooperative management professionalism
3. Assisting cooperatives to enter free trade era



Konsolidasi JUK dari berbagai wilayah.



Lokakarya pengembangan Coop-mart, diselenggarakan JUK Dekopin



Pameran SMK EXPO 2 Tahun 2015

JARINGAN USAHA KOPERASI (JUK)

Pada dasarnya Jaringan Usaha Koperasi (JUK) ini adalah implementasi dari salah satu prinsip koperasi yang telah ditetapkan oleh ICA, yaitu kerjasama antar koperasi (Co-operation Among Co-operative).

Tujuan:

Untuk mengembangkan bisnis, koperasi Indonesia mutlak membutuhkan sebuah jaringan usaha yang solid, dengan jangkauan luas yang seharusnya dimulai dari antar koperasi dan terbuka dengan badan usaha lainnya. Jaringan Usaha Koperasi (JUK), yang dibentuk pada 10 November 1992, hadir untuk memenuhi kebutuhan tersebut. JUK memfasilitasi koperasi yang memasarkan produknya, antara lain dengan membangun database, menyelenggarakan kegiatan temu usaha dan lokakarya dengan metode Erfa, yang sudah terbukti efektif diterapkan gerakan koperasi di negara lain, seperti Denmark.

Kegiatan:

Kerjasama usaha koperasi yang dibangun JUK, meliputi pembelian, penjualan, dan pembiayaan bersama yang merupakan embrio kegiatan trading house koperasi, sebagai inti kegiatan Sentra Bisnis Koperasi.

Alamat:

Gedung DEKOPIN
Jalan Raya Pasar Minggu No. 97 B, Jakarta Selatan 12520
Telp. 021 791 95712 (hunting) Faks. 021 791 95718

BADAN KOMUNIKASI WANITA KOPERASI (BKWK)

Badan Komunikasi Wanita Koperasi (BKWK) dibentuk pada 30 Desember 1999. BKWK adalah organisasi perangkat Dekopin untuk melaksanakan kegiatan khusus berdasarkan program kerja Dekopin.

Tujuan:

BKWK mengemban misi Dekopin dalam melakukan pembinaan pada kelompok strategis wanita, khususnya di kalangan gerakan koperasi, sehingga terbentuk sumber daya insani pembangunan koperasi dan koperasi di kalangan wanita.

Kegiatan:

1. Peningkatan peran wanita koperasi dalam pengembangan usaha jasa keuangan dan industri kreatif-mandiri.
2. Peningkatan kapasitas dan kinerja BKWK.
3. Penguatan kapasitas kelembagaan koperasi di kalangan wanita melalui penyelenggaraan temu-karya di tingkat nasional dan daerah.
4. Pengembangan model komunikasi dalam rangka peningkatan kesadaran berkoperasi dan penumbuhan citra koperasi di kalangan wanita.

Alamat:

Gedung DEKOPIN
Jl. Raya Pasar Minggu No. 97 B, Jakarta Selatan 12520
Telp. 021 791 95712 (Hunting) Faks. 021 791 95718

COOPERATIVE NETWORK ENTERPRISES (JUK)

Basically, Cooperative Network Enterprises (JUK) is an implementation from one of cooperatives principles that has been set by ICA, which is cooperation among cooperatives.

Goals:

In order to develop the business, Indonesian cooperatives absolutely need a solid network enterprises, with a wide range that should have been started among cooperatives and open with other business entities. The Cooperative Network Enterprises (JUK), which was formed on 10th November 1992, comes to meet those needs. JUK facilitates cooperatives to market their products, among others by building a database, conducting business meeting and workshop with Erfa method, which has proven effective applied by cooperative movement in other countries, like Denmark.

Activities:

The cooperation among cooperative enterprises built by JUK, includes purchasing, selling, and joint payment is an embryo of cooperative trading house activity, as the core activity of the Cooperative Business Centre.

Address:

DEKOPIN Building
Jl. Raya Pasar Minggu No. 97 b, South Jakarta 12520
Phone. 021 791 95712 (hunting) Fax. 021 791 95718

COMMUNICATION BUREAU OF COOPERATIVE WOMAN (BKWK)

Communication Bureau of Cooperative Woman (BKWK) was formed on 30th December 1999. BKWK is a DEKOPIN's device organization functioning to carry out specific activities based on DEKOPIN's framework.

Goals:

BKWK carries DEKOPIN's mission in fostering strategic groups of women, especially among the cooperative movement, thus formed the development of cooperative human resources and woman cooperatives.

Activities:

1. Improvement the role of cooperative woman in developing financial services enterprises and independent-creative industry.
2. Improvement of BKWK's capacity and performance.
3. Strengthening of cooperative institution capacity among women through workshop implementation in national and regional levels.
4. Development of communication model in order to increase the cooperative awareness and the growth of cooperative images among women.

Address:

DEKOPIN Building
Jl. Raya Pasar Minggu No. 97 b, South Jakarta 12520
Phone. 021 791 95712 (hunting) Fax. 021 791 95718



Konsolidasi BKWK untuk memperkuat jaringan perempuan pengembang koperasi.



Badan dan Lembaga Teknis Dekopin, merumuskan program bersama untuk saling bersinergi.



Pameran SMK EXPO 2 Tahun 2015



BKPH Dekopin, membahas issue-issue penting di gerakan koperasi.



BKPH Dekopin, memberi pelayanan hukum pada gerakan koperasi.



BKPH Dekopin, membahas issue-issue penting di gerakan koperasi.

BADAN KOMUNIKASI PEMUDA KOPERASI (BKPK)

Badan Komunikasi Pemuda Koperasi (BKPK) dibentuk pada tanggal 30 Desember 1999. BKPK adalah organisasi perangkat Dekopin untuk melaksanakan kegiatan khusus berdasarkan program kerja Dekopin.

Tujuan:

Sebagai organisasi pengkaderan yang melakukan pembinaan pada kelompok strategis pemuda di kalangan gerakan koperasi, sehingga terbentuk sumber daya insani pembangunan koperasi.

Kegiatan:

1. Peningkatan peran pemuda koperasi dalam pengembangan usaha jasa keuangan dan industri kreatif-mandiri.
2. Peningkatan kapasitas dan kinerja BKPK.
3. Penguatan kapasitas kelembagaan koperasi di kalangan pemuda melalui penyelenggaraan temu-karya di tingkat nasional dan daerah.
4. Pengembangan model komunikasi dalam rangka peningkatan kesadaran berkoperasi dan penumbuhan citra koperasi di kalangan pemuda dan generasi muda.

Alamat:

Gedung DEKOPIN
Jalan Raya Pasar Minggu No. 97 B, Jakarta Selatan 12520
Telp. 021 791 95712 (hunting) Faks 021 791 95718

BADAN PELAYANAN DAN KONSULTASI HUKUM (BPKH)

Badan Pelayanan dan Konsultasi Hukum (BPKH) dibentuk pada tanggal 11 Oktober 1995. BPKH adalah organisasi perangkat Dekopin di bidang pelayanan dan konsultasi hukum bagi kepentingan gerakan koperasi anggota Dekopin.

Tujuan:

1. Membantu Pimpinan Dekopin dalam kegiatan pengkajian, penelitian, pembinaan dan penyuluhan hukum.
2. Membantu gerakan koperasi dalam menyelesaikan berbagai masalah yang berkaitan dengan hukum, khususnya bidang koperasi.
3. Mengadakan jaringan kerja sama dengan lembaga terkait lainnya.

Kegiatan:

1. Menelaah masalah-masalah hukum yang berkaitan dengan perkoperasian.
2. Menumbuhkan kesadaran hukum di kalangan gerakan koperasi.
3. Memberikan pelayanan hukum pada kalangan gerakan koperasi.
4. Mengadakan kegiatan seperti pendidikan, lokakarya, serta diskusi tentang hukum yang terkait dengan perkoperasian.

Alamat:

Gedung DEKOPIN
Jalan Raya Pasar Minggu No. 97 B, Jakarta Selatan 12520

COMMUNICATION BUREAU OF COOPERATIVE YOUTH (BKPK)

Communication Bureau of Cooperative Youth (BKPK) was formed on 30th December 1999. BKPK is a DEKOPIN's device organization functioning to carry out specific activities based on DEKOPIN's framework.

Goals:

As a cadre organization which fostering the strategic groups of youth among cooperative movement, thus formed the development of cooperative human resources.

Activities:

1. Improvement the role of cooperative youth in developing financial services enterprises and independent-creative industry.
2. Improvement of BKPK's capacity and performance.
3. Strengthening of cooperative institution capacity among youth through workshop implementation in national and regional levels.
4. Development of communication model in order to increase the cooperative awareness and the growth of cooperative images among youth and young generation.

Address:

DEKOPIN Building
Jl. Raya Pasar Minggu No. 97 b, South Jakarta 12520
Phone. 021 791 95712 (hunting) Fax. 021 791 95718

LAW SERVICES AND CONSULTATIONS BUREAU (BPKH)

Law Services and Consultations Bureau (BPKH) was formed on 11th October 1995. BPKH is a DEKOPIN's device organization in law services and consultations field for cooperative movement's interests, especially for the DEKOPIN's members.

Goals:

1. To assist DEKOPIN's plenary in legal research, study, fostering and counseling activities.
2. To assist cooperative movement in resolving various issues relating to the law, particularly in the field of cooperative.
3. Holding a cooperation network with other relevant institutions.

Activities:

1. Examining the legal issues related to cooperatives.
2. Raising legal awareness among cooperative movement.
3. Providing legal services to the cooperative movement.
4. Organizing activities such as trainings, workshops, and discussions about legal related to cooperatives.

Address:

DEKOPIN Building
Jl. Raya Pasar Minggu No. 97 b, South Jakarta 12520
Phone. 021 791 95712 (hunting) Fax. 021 791 95718



Menggalang potensi pemuda melalui Jampore Pemuda Koperasi.



Peserta Upgrading Pemandu Lapenkop Sedang mendengarkan instruksi pelatih Scapa-AD



Menggalang potensi pemandu melalui Upgrading Pemandu Lapenkop.



Menteri Pemuda dan Olahraga Mengapresiasi dengan memberikan tanda tangan pada hasil karya siswa SMK pada SMK Expo 2.



Ketua Umum Dekopin duduk di belakang kemudi minibus hasil karoseri siswa SMK.



Sarana pertanian dengan teknologi efisien yang disiptakan siswa SMK.



BADAN PUSAT INFORMASI PERKOPERASIAN (BP-PIP)

Badan Pusat Informasi Perkoperasian (BP-PIP) memainkan peran penting dalam upaya meningkatkan citra koperasi Indonesia, mendukung kegiatan advokasi koperasi, mengkomunikasikan berbagai kebijakan dan kegiatan Dekopin, serta menyusun dan mengolah data perkoperasian.

Tujuan:

1. Menyebarkan informasi tentang perkoperasian.
2. Meningkatkan citra Dekopin dan koperasi Indonesia.
3. Meningkatkan intensitas pertukaran informasi di kalangan gerakan koperasi.
4. Sebagai salah satu sarana pelaksanaan fungsi-fungsi publikasi dan pencitraan Dekopin.

Kegiatan:

1. Menangani kegiatan publikasi Dekopin.
2. Pengembangan, pengelolaan database koperasi, dan perpustakaan koperasi.
3. Membangun dan mengelola website Dekopin.
4. Merancang dan menerbitkan buku-buku perkoperasian.
5. Mengelola penerbitan Majalah Pusat Informasi Perkoperasian (PIP).

Alamat:

Gedung DEKOPIN
Jalan Raya Pasar Minggu No. 97 B, Jakarta Selatan 12520
Telp. 021 791 95712 (hunting) Faks. 021 791 95718



CENTRAL BUREAU FOR COOPERATIVE INFORMATION (BP-PIP)

Central Bureau for Cooperative Information (BP-PIP) plays important roles in improving the image of Indonesian cooperatives, supporting cooperative advocacy activities, communicating various policies and DEKOPIN's activities, as well as organizing and processing cooperatives data.

Goals:

1. Propagating information about cooperatives.
2. Improving DEKOPIN and Indonesian Cooperatives image.
3. Increasing the intensity of information exchange among cooperative movement.
4. Acting as one of the implementing facilities for DEKOPIN's imaging and publication functions.

Activities:

1. Handling DEKOPIN's publication activities.
2. Developing, processing cooperatives database, and cooperatives library.
3. Building and running DEKOPIN's website.
4. Designing and publishing cooperative's books.
5. Managing the Cooperative Centre Information's Magazine publishing.

Address:

DEKOPIN Building
 Jl. Raya Pasar Minggu No. 97 b, South Jakarta 12520
 Phone. 021 791 95712 (hunting) Fax. 021 791 95718



NAMA INDUK-INDUK KOPERASI DAN DEKOPINWIL

NAMES OF NATIONAL FEDERATION OF CO-OPERATIVES AND DEKOPINWIL

NAMA DAN ALAMAT INDUK-INDUK KOPERASI NAMES AND ADDRESSES NATIONAL FEDERATION OF CO-OPERATIVES

- 1. Gabungan Koperasi Batik Indonesia (GKBI)**
The Indonesian Batik Co-operatives Federation
- 2. Induk Koperasi TNI Angkatan Laut (INKOPAL)**
The National Federation of Navy Co-operatives
- 3. Induk Koperasi Unit Desa (Induk KUD)**
The National Federation of Village Unit Co-operatives
- 4. Induk Koperasi Veteran Republik Indonesia (INKOVERI)**
The National Federation of the Indonesian Veteran Co-operatives
- 5. Induk Koperasi Kelapa Indonesia (IKKI)**
The National Federation of the Indonesian Copra Co-operatives
- 6. Induk Koperasi Kepolisian RI (INKOPPOL)**
The National Federation of the Indonesian Police Co-operatives
- 7. Induk Koperasi Purnawirawan Angkatan Bersenjata RI (INKOPPABRI)**
The National Federation of the Indonesian Retired Armed Forces Personnel Co-operatives
- 8. Koperasi Bisnis Indonesia (KBI)**
The Indonesian Business Co-operatives
- 9. Pusat Koperasi Pelayaran Rakyat (PUSKOPELRA)**
The Indonesian People's Shipping Co-operative Federation
- 10. Koperasi Asuransi Jasa Indonesia (KOP-AJINDO)**
The Indonesian Service Insurance Co-operatives
- 11. Koperasi Pemuda Indonesia (KOPINDO)**
The Indonesian Youth Co-operatives
- 12. Induk Koperasi TNI Angkatan Udara (INKOPAU)**
The National Federation of the Indonesian Air Force Co-operatives
- 13. Induk Koperasi Pegawai Republik Indonesia (IKPRI)**
The National Federation of the Indonesian Civil Servants Co-operatives
- 14. Induk Koperasi TNI Angkatan Darat (INKOPAD)**
The National Federation of the Indonesian Army Forces Co-operatives
- 15. Gabungan Koperasi Susu Indonesia (GKSI)**
The Indonesian Dairy Co-operative Federation
- 16. Induk Koperasi Perikanan Indonesia (IKPI)**
The National Federation of the Indonesian Fishermen Co-operatives
- 17. Gabungan Koperasi Pesisir Nusantara (GKPN)**
Union of the Indonesia Coastal Co-operative
- 18. Induk Koperasi Wredatama (INKOPTAMA)**
The National Federation of the Indonesian Retired Workers Co-operatives
- 19. Koperasi Pemukiman Nasional (KOPENAS)**
The National Housing Co-operatives
- 20. Koperasi Jasa Audit Nasional (KJAN)**
The National Audit Service Co-operatives
- 21. Induk Koperasi Karyawan (INKOPKAR)**
The National Federation of Workers Co-operatives
- 22. Pusat Koperasi Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (PUSKOP MABES TNI)**
The Central Indonesian Armed Head Quarter Co-operatives
- 23. Induk Koperasi Pedagang Pasar (INKOPPAS)**
The National Federation of Market Traders Co-operatives
- 24. Induk Koperasi Wanita (INKOWAN)**
The National Federation of the Indonesian Women Co-operatives
- 25. Induk Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Pelabuhan (INKOP - TKBM)**
Loading and Unloading Workers Co-operative Federation

26. **Induk Koperasi Ternak Potong Indonesia (INKOTERPI)**
The National Federation of the Indonesian Slaughter Houses Co-operatives
27. **Induk Koperasi Tahu Tempe Indonesia (INKOPTI)**
The National Federation of the Indonesian Soybean Co-operatives
28. **Induk Koperasi Wanita Pengusaha Indonesia (INKOWAPI)**
The National Federation of the Indonesian Women Entrepreneurs Co-operatives
29. **Koperasi Distribusi Indonesia (KDI)**
The Indonesian Distribution Co-operatives
30. **Induk Koperasi An-Nisa (INKOPAN)**
The National Federation of the An-Nisa Co-operatives
31. **Induk Koperasi Masyarakat Bumi Putera (INKOMAS BP)**
The National Federation of the Indonesian Bumi Putera Societys Co-operatives
32. **Induk Koperasi Pribumi Indonesia (INKOPI)**
The National Federation of the Indonesian Native People's Co-operatives
33. **Koperasi Bhakti Pemuda Indonesia (KOPNAS)**
The Indonesian Youth Working Co-operatives
34. **Induk Koperasi Kerajinan Rakyat (INKOPINKRA)**
The National Federation of the Indonesian People's Handicraft Co-operatives
35. **Pusat Koperasi Mega Gotong Royong (Pusat KOMEGORO)**
The Central Mutual Assistance Co-operatives
36. **Induk Koperasi Tani (INKOPTAN)**
The National Federation of the Indonesian Agricultural Co-operatives
37. **Induk Koperasi Simpan Pinjam (IKSP)**
The National Federation of the Indonesian Savings and Loan Co-operatives
38. **Induk Koperasi Jamu Indonesia (INKOJAM)**
The National Federation of the Indonesian Herbal Medicines Co-operatives
39. **Induk Koperasi Takmir Al-Masjid Indonesia (INKOPTAMI)**
The National Federation of the Indonesian Takmir al Masjid
40. **Induk Koperasi Perunggasan Indonesia (INKOPSI)**
The National Federation of the Indonesian Poultry Co-operatives
41. **Induk Koperasi Perkebunan Tebu Rakyat Indonesia (INKOPETRI)**
The National Federation of the Indonesian Sugarcane Plantation Co-operatives
42. **Induk Koperasi Usaha Karya Indonesia (INKUKINDO)**
The National Federation of the Indonesian Usaha Karya
43. **Induk Koperasi Kesejahteraan Umat Dewan Masjid Indonesia (IKKU-DMI)**
The National Federation of the Indonesian Mosque Council Welfare Co-operatives
44. **Induk Koperasi Pondok Pesantren (INKOPONTREN)**
The National Federation of the Indonesian Islamic Boarding School Co-operatives
45. **Induk Koperasi Batu Bara (INKOBARA)**
The National Federation of the Indonesian Coal Co-operatives
46. **Induk Koperasi Kredit (INKOPDIT)**
The National Federation of the Indonesian Credit Union
47. **Induk Koperasi Pekerja Rokok Makanan dan Minuman (INKOP RTMM)**
The National Federation of the Indonesian Cigarette, Food and Beverages Workers
48. **Induk Koperasi Industri Kerajinan Logam Besi Indonesia (INKUKILINDO)**
The National Federation of the Indonesian Iron Metal Handicraft Co-operatives

49. Induk Koperasi Usaha Swadaya Mandiri (INKOPUSMA)
The National Federation of the Indonesian Self Help Business Co-operatives

50. Induk Koperasi Perdagangan Indonesia (IKPI)
The National Federation of the Indonesian Trading Co-operatives

51. Induk Koperasi Angkutan Barang (INKOPANG)
The National Federation of the Indonesian Luggage Transport Co-operatives

52. Induk Koperasi Syariah BMT (INKOPSYAH BMT)
The National Federation of the Indonesian Islamic Law Banking Co-operatives

53. Koperasi INSANI
The Co-operatives of INSANI

54. Induk Koperasi Sawit Indonesia (IKSI)
The National Federation of the Indonesian Palm Co-operatives

55. Induk Koperasi Syirkah Muawanah (INKOPSIM)
The National Federation of Syirkah Muawanah

56. Induk Koperasi Jasa Kesehatan Indonesia (IKJKI)
The National Federation of the Health Service Co-operatives

57. Induk Koperasi PERNETWORK
The National Federation of PERnet's Indonesia

58. Induk Koperasi Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (INKOP-PAMSI)
The National Federation of Drink Water Co-operatives

NAMA DAN ALAMAT DEKOPINWIL NAMES AND ADDRESSES OF DEKOPINWIL

1. DEKOPIN Wilayah NAD
DEKOPIN of NAD Province
Jalan Bandara Sultan Iskandar Muda Km. 13
Cot Geundret, Aceh Besar
Telp. 0651 32993 Faks. 0651 26772

2. DEKOPIN Wilayah Sumatera Utara
DEKOPIN of North Sumatera Province
Jalan Sei Besitang No. 7, Medan 20119
Telp. 061 4147591 Faks. 061 4147591

3. DEKOPIN Wilayah Sumatera Barat
DEKOPIN of West Sumatera Province
Jalan S. Parman No. 238, Ulak Karang
Padang 251133
Telp. 0751 7055392 Faks. 0751 7055392

4. DEKOPIN Wilayah Riau
DEKOPIN of Riau Province
Komp. Puri Nangka Sari Blok C No. 1 - Riau 28282
Telp. 0761 34535 Faks. 0761 29152

5. DEKOPIN Wilayah Kepulauan Riau
DEKOPIN of Riau Islands Province
Jalan D.I. Panjaitan No. 19, Km. 9, Tanjung Pinang
Telp. 0771 441708 Faks. 0771 442678

6. DEKOPIN Wilayah Bangka Belitung
DEKOPIN of Bangka Belitung Province
Jalan Rasakunda Kel. Bukit Intan, Pangkal Pinang
Telp. 0717 438090 Faks. 0717 431402

7. DEKOPIN Wilayah Jambi
DEKOPIN of Jambi Province
Jalan Mayjen HM. Yusuf Singedekane No. 25
Telanaipura, Jambi 36122
Telp. 0741 329672 Faks. 0741 61662

8. DEKOPIN Wilayah Sumatera Selatan
DEKOPIN of South Sumatera Province
Jalan Natuna No. 2, Palembang 30137
Telp. 0711 377445 Faks. 0711 377445

9. DEKOPIN Wilayah Bengkulu
DEKOPIN of Bengkulu Province
Jalan Beringin No. 57, Bengkulu 38227
Telp. 0736 20935 Faks. 0736 20935

10. DEKOPIN Wilayah Lampung
DEKOPIN of Lampung Province
Jalan Pramuka Raya, Gg. Way Lalaan No. 9-
Bandar Lampung

11. DEKOPIN Wilayah Banten
DEKOPIN of Banten Province
Jalan K.H. Sueb No. 7, Cigabus - Serang, Banten
Telp. 0254 220888, Faks. 0254 212282

12. DEKOPIN Wilayah DKI Jakarta
DEKOPIN Special Capital District (DKI) Jakarta
Jalan Darmawangsa Raya No. 18
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160
Telp. 021 7222669 Faks. 021 7222669

- 13. DEKOPIN Wilayah Jawa Barat**
DEKOPIN of West Java Province
Gedung Sentral Bisnis KUKM (SENBK)
Jl. Soekarno Hatta No. 729 C, Bandung 40286
- 14. DEKOPIN Wilayah Jawa Tengah**
DEKOPIN of Central Java Province
Jalan Pamularsih No. 68, Semarang Barat 50148
Telp. 024 7601825 Faks. 024 7601825
- 15. DEKOPIN Wilayah D.I. Yogyakarta**
DEKOPIN of Special District (D.I.) Yogyakarta
Jl. Ringin Putih No. 7, Kotagede, Yogyakarta
- 16. DEKOPIN Wilayah Jawa Timur**
DEKOPIN of East Java Province
Jl. Chairil Anwar No. 14, Surabaya 60265
- 17. DEKOPIN Wilayah Bali**
DEKOPIN of Bali Province
Jalan Rampai No. 2, Denpasar 80233
Telp. 0361 226548 Faks. 0361 226548
- 18. DEKOPIN Wilayah Nusa Tenggara Barat**
DEKOPIN West Nusa Tenggara Province
Jalan Bung Karno, Mataram 83232
Telp. 0370 637339 Faks. 0370 637339
- 19. DEKOPIN Wilayah Nusa Tenggara Timur**
DEKOPIN of East Nusa Tenggara Province
Jalan Soekarno No. 32, Kupang 85112
Telp. 0380 821588, 829766, 833330 Faks. 0380 821588
- 20. DEKOPIN Wilayah Kalimantan Barat**
DEKOPIN of West Kalimantan Province
Jalan Letjen Sutoyo No. 123, Pontianak 78121
Telp. 0561 767229 Faks. 0561 767229
- 21. DEKOPIN Wilayah Kalimantan Tengah**
DEKOPIN of Central Kalimantan Province
Jalan Willem AS No. 6, Palangkaraya 73111
Telp. 0536 3236636 Faks. 0536 3236636
- 22. DEKOPIN Wilayah Kalimantan Selatan**
DEKOPIN of South Kalimantan Province
Jalan Jend. MT. Haryono No. 122 Banjarmasin
Telp. 0511 3357838, 275152 Faks. 0511 350053, 54145
- 23. DEKOPIN Wilayah Kalimantan Timur**
DEKOPIN of East Kalimantan Province
Jalan MT. Haryono Kav. 1, Samarinda
Telp. 0541 741826, 733451 Faks. 0541 741826
- 24. DEKOPIN Wilayah Gorontalo**
DEKOPIN of Gorontalo Province
Jalan Teuku Umar 1, Komp. Masjid Baiturrahim
Kel. Limba U1, Kota Selatan, Kota Gorontalo
96116
- 25. DEKOPIN Wilayah Sulawesi Utara**
DEKOPIN of North Sulawesi Province
Stadion Klabat Selatan No. 10, Ranotana, Manado
- 26. DEKOPIN Wilayah Sulawesi Barat**
DEKOPIN of West Sulawesi Province
Jalan Jend. Sudirman No. 30, Mamuju
Sulawesi Barat
- 27. DEKOPIN Wilayah Sulawesi Tengah**
DEKOPIN of Central Sulawesi Province
Jalan R.A. Kartini No. 43, Palu 94112
Telp. 0451 421226 Faks. 0451 421226
- 28. DEKOPIN Wilayah Sulawesi Selatan**
DEKOPIN of South Sulawesi Province
Jalan Meranti No. 1 (Gd. Amkop)
Ujung Pandang 90231
Telp. 0411 440433 Faks. 0411 440433
- 29. DEKOPIN Wilayah Sulawesi Tenggara**
DEKOPIN of South East Sulawesi
Jalan DR. Sam Ratulangi No. 27, Kendari
Telp. 0401 322083 Faks. 0401 322083
- 30. DEKOPIN Wilayah Maluku**
DEKOPIN of Maluku Province
Jalan Raya Patty No. 34, Ambon 97126
Telp. 0911 353218 Faks. 0911310027
- 31. DEKOPIN Wilayah Maluku Utara**
DEKOPIN of North Maluku Province
Puskud Halmahera Jaya
Jalan Lembaga Jambula Kecamatan Pulau
Ternate Kota Ternate
- 32. DEKOPIN Wilayah Papua**
DEKOPIN of Papua Province
Puskud Papua
Jalan Raya Adipura - Kota Raja
Jayapura - Papua
- 33. DEKOPIN Wilayah Kalimantan Utara**
DEKOPIN of North Kalimantan Province
Jl. Katamso RT. 22/13, Tanjung Selor Hilir,
Tanjung Selor Bulungan - Kalimantan Utara

PROFILE



DEKOPIN

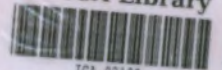
**JL. RAYA PASAR MINGGU NO.97B
JAKARTA SELATAN 12520**

Phone : 021 791 95 712 | Fax : 021 791 95 718

www.dekopin.or.id

sekjendekopin@gmail.com

ICA Library



ICA 02108